



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);



4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 202 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 10).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.



11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistematika rencana strategis;
- b. pengendalian dan evaluasi; dan
- c. perubahan rencana strategis.

Pasal 3

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:



- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- o. Dinas Tenaga Kerja;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- dd. Kecamatan Bogor Tengah;
- ee. Kecamatan Bogor Selatan;
- ff. Kecamatan Bogor Barat;
- gg. Kecamatan Bogor Utara;
- hh. Kecamatan Bogor Timur; dan
- ii. Kecamatan Tanah Sareal.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;



- c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pemantauan dan supervisi bagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Perangkat Daerah.



BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Sebelum Renstra Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota terpilih berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Desember 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 5 Desember 2025

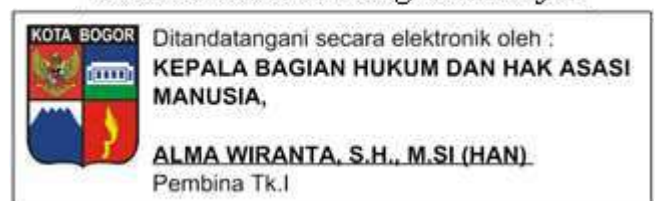
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

DENNY MULYADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

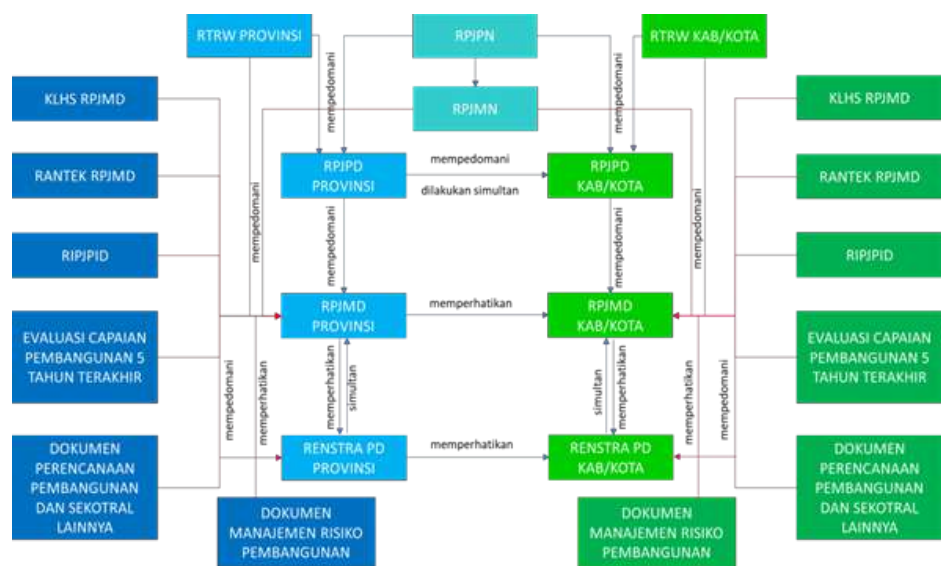
1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 agar kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahunan dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah ini berfungsi sebagai :

- a. Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
- c. Kontrak kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.



Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD Kota Bogor yang diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor, yang memuat Visi : Bogor Beres, Bogor Maju, dengan Misi : Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera dan Bogor Lancar. RPJMD Kota Bogor ini merupakan periode 5 (lima) tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Bogor 2025-2045 yang mempunyai Visi : Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan.

Dengan demikian dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan mempedomani :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Rencana Tata Ruang Wilayah
- Evaluasi Capaian Pembangunan 5 (lima) tahun terakhir
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Dokumen Perencanaan Sektoral lainnya

Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2025-2029, penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025-2029 telah melalui proses koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan penetapan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya, cakupan layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada Renstra Perangkat Daerah ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 129 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor memegang urusan lingkungan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - g. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680);
 - k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
 - m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah,

menyempurnakan peraturan yang ada untuk mendukung operasional bank sampah di Indonesia;

- n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- o. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penanganan sampah yang timbul akibat bencana, memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan sampah yang bersifat organik dan anorganik pasca-bencana, dan mendefinisikan peran Kementerian, Gubernur, serta Bupati/Wali Kota dalam koordinasi penanganan;
- p. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementrian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tahun 2025-2029.
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
- r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun - (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ...);
- u. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 121);

- v. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
- w. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019);
- x. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 151);
- y. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2023-2053;
- z. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 163);
- aa. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029;
- bb. Peraturan Wali Kota Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- cc. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119) 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 21);

- dd. Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 129)
- ee. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Nomor 57 Tahun 2023) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Nomor 2 Tahun 2025);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kota Bogor 2025-2029, terutama yang terkait dengan urusan lingkungan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor adalah :

- 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2025-2029 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029;
- 2) Memberikan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2025-2029);
- 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor 2025-2029 disusun sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

Memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

- a. Tugas, fungsi dan struktur PD;
- b. Sumber daya PD;
- c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
- d. Kelompok sasaran pelayanan PD;
- e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan ;
- f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD ;
- g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
- b. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Renstra PD

- a. Menguraikan Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD terkait dengan cakupan layanan perangkat daerah dan keterkaitan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah
- b. Merumuskan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah
- c. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
- d. Jika PD mampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
- e. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan kalimat kondisi, dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

- f. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

3.2 Pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 Penjenjangan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan penjenjangan Kinerja PD merupakan cascading dari tujuan dan sasaran perangkat daerah sampai dengan sub kegiatan terkait beserta indikator kinerjanya.

4.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja dan pagu indikatif yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

4.3 Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Kunci/Daerah Perangkat Daerah

Menguraikan target IKU, IKK, SPM serta Prioritas Pembangunan Daerah terkait dengan layanan Perangkat Daerah.

4.4 Rencana Pemenuhan SPM (hanya Untuk PD Yang Mengampu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 151) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119) 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 21), dimana merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bogor.

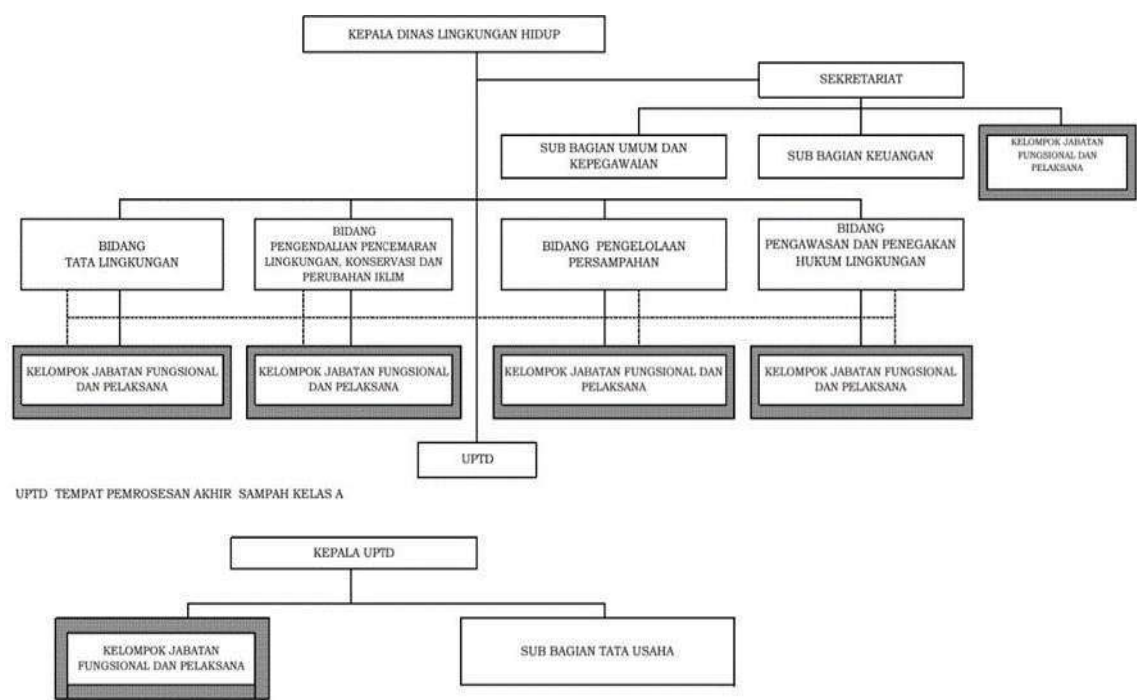
Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi, dan Perubahan Iklim membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- e. Bidang Pengelolaan Persampahan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- g. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A membawahkan:
 - 1. Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu:

1. Perencanaan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyusunan KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kabupaten/Kota;
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati), kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota;
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), kewenangan Kabupaten/Kota yakni pembinaan dan pengawasan

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam hal peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengaduan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota.
11. Persampahan, kewenangan Kabupaten/Kota tentang pengelolaan sampah dan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta juga pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;
- c. pelaksanaan tugas administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang tata lingkungan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang tata lingkungan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang tata lingkungan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi, dan Perubahan Iklim mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;

- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pengelolaan persampahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan persampahan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan persampahan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;

- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A;
- c. pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

2.1.2.Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan 5 (lima) tahun kedepan. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor memiliki 1.552 orang pegawai, terdiri dari 384 orang ASN.

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Bagian	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala	1	-
2	Sekretariat	7	6
3	TL	4	5

4	PPHL	3	1
5	PPLKPI	5	4
6	PERSAMPAHAN	190	8
7	UPTD TPA	7	1
8	Non ASN	1.240	70
JUMLAH		1.457	95
		93,88%	6,12%

Sumber : SIMPEG 2025

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No	Jenis Golongan	Jumlah
1	I	25
2	II	135
3	III	62
4	IV	13
5	V	1
JUMLAH		236

Sumber : SIMPEG 2025

Tabel 2.3 Kebutuhan Sumberdaya ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

No	Nama Jabatan	Kondisi SDM sampai Semester II 2025 (orang)			Kebutuhan SDM (orang)			Selisih Kebutuhan SDM (orang)		
		PNS	PPPK	Tota I ASN	PNS	PPPK	Tota I ASN	PNS	PPPK	Tota I ASN
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
3	Kepala Bidang	1	0	1	1	0	1	0	0	0

	Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor									
4	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi Dan Perubahan Iklim Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	Kepala Bidang Tata Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	0	1	1	0	1	0	0	0
7	Kasubag Keuangan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	0	1	1	0	1	0	0	0
8	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	1	0	1	1	0	1	0	0	0

	Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor									
9	Kepala Uptd Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10	Kasubag Tata Usaha Uptd Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	0	1	1	0	1	0	0	0
11	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
12	Arsiparis Terampil Penyelia	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
13	Arsiparis Terampil Mahir	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
14	Arsiparis Terampil	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
15	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	5	0	5	3	0	3	-2	0	-2
16	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
17	Pengawas	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1

	Lingkungan Hidup Ahli Pertama									
18	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	5	0	5	2	0	2	-3	0	-3
18	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	12	0	12	1	0	1	-11	0	-11
19	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	0	9	4	0	4	-5	0	-5
20	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Terampil	4	0	4	0	0	0	-4	0	-4
21	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
22	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
23	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	0	8	0	0	0	-8	0	-8
24	Perencana Ahli Madya	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
25	Perencana Ahli Pertama	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
26	Perencana Ahli Muda	1	0	1	1	0	1	0	0	0

39	Pengadministrasi Perkantoran	45	0	45	30	0	30	-15	0	-15
40	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
41	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan Dan Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pengadministrasi Umum	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
43	Pengawa s Lapangan Angkutan Sampah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir (tpa)	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
45	Pengawas Pengembangan Sarana Iptek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Pengelola Kendaraan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pengelola Layanan Operasional	13	0	13	0	6	0	-13	-6	-13

49	Pengelola a Penataan Sampah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pengelola Umum Operasional	1	1	2	1	0	1	-1	0	-1
51	Pengolah Data Dan Informasi	17	0	17	1	0	1	-16	0	-14
52	Pengolah Data Dan Informasi Inkubator Bisnis	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
53	Penyuluh Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
54	Pramu Kebersihan	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
Jumlah		234	2	236	305	75	380	-151	-75	-151

Sumber : Hasil Analisa 2025

Pada tabel 2.3 di atas, terkait kebutuhan sumberdaya ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, menunjukkan perbandingan antara kondisi eksisting jumlah ASN sampai dengan Semester I Tahun 2025 dengan kebutuhan ideal ASN yang telah ditetapkan. Pada tabel tersebut, terlihat jumlah ASN yang tersedia di beberapa jabatan ada yang sudah sesuai dengan kebutuhan dan ada pula yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.

Pada tabel di atas, jumlah ASN yang tersedia sebanyak 236 orang ASN, sementara kebutuhan mencapai 385 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 151 orang ASN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum terdapat perbedaan antara kondisi eksisting jumlah ASN sampai dengan Semester I Tahun 2025 dengan kebutuhan ideal ASN yang telah ditetapkan pada jabatan jabatan tertentu. Oleh karena itu, strategi pengadaan, redistribusi, dan pengembangan pegawai perlu diarahkan untuk menutup kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor 2025–2029, khususnya dalam konteks perencanaan manajemen ASN yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 2.4 Pegawai Persampahan dan UPTD TPA Galuga

No	Uraian	Sampai dengan Semester I tahun 2025		Jumlah Kebutuhan sampai Tahun 2029	
		ASN	Non ASN	ASN	Non ASN
1	Pengangkutan	111	458	139	458
2	Penyapuan	71	691	99	691
3	TPA Galuga	8	46	14	46
4	TPS 3R	12	86	28	86
	Total	202	1281	280	1281

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

Pada tabel 2.4 di atas, terkait kebutuhan sumberdaya ASN pada bidang persampahan yang disebar di pengangkutan, penyapuan, TPA Galuga dan TPS 3R, menunjukkan perbandingan antara kondisi eksisting jumlah ASN dan Non ASN bidang persampahan sampai dengan Semester I Tahun 2025 dengan kebutuhan ideal ASN dan non ASN yang telah ditetapkan. Pada tabel di atas, jumlah ASN yang tersedia sebanyak 202 orang ASN dan jumlah non ASN yang tersedia sebanyak 1281 orang non ASN. sehingga masih terdapat kekurangan 78 orang ASN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum terdapat perbedaan antara kondisi eksisting jumlah ASN sampai dengan Semester I Tahun 2025 dengan kebutuhan ideal ASN yang telah ditetapkan pada jabatan jabatan tertentu. Oleh karena itu, strategi pengadaan, redistribusi, dan pengembangan pegawai perlu diarahkan untuk menutup kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor 2025–2029, khususnya dalam konteks perencanaan manajemen ASN yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 2.5 Rencana Pengembangan Kompetensi Sumber daya Manusia Melalui Jalur Pendidikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Eksisting Jabatan	Jumlah Eksisting yang sesuai Syarat Minimal Pendidikan	Eksisting Pendidikan		Rencana Pemenuhan Pendidikan Sesuai Syarat Minimal
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
2	Administrator	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-1/ Sarjana	1	
		Kepala Bidang Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
		Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
		Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim pada	S-1/D-IV	1	1	S-1/ Sarjana	1	

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Eksisting Jabatan	Jumlah Eksisting yang sesuai Syarat Minimal Pendidikan	Eksisting Pendidikan		Rencana Pemenuhan Pendidikan Sesuai Syarat Minimal
		Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor						
		Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
3	Pengawas	Kasubag Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	D-III/ Sarjana Muda	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
		Kasubag Tata Usaha UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	D-III/ Sarjana Muda	1	1	S-1/ Sarjana	1	
		Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	D-III/ Sarjana Muda	1	1	S-1/ Sarjana	1	
		Kepala UPTD	D-III/	1	1	S-1/ Sarjana	1	

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Eksisting Jabatan	Jumlah Eksisting yang sesuai Syarat Minimal Pendidikan	Eksisting Pendidikan		Rencana Pemenuhan Pendidikan Sesuai Syarat Minimal
		Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Sarjana Muda					
4	Fungsional	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	S-1/D-IV	2	2	S-1/ Sarjana	1	
						S-2/ Pascasarjana	1	
		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	S-1/D-IV	4	4	S-2/ Pascasarjana	4	
		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S-1/D-IV	1	1	S-1/ Sarjana	1	
		Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	S-1/D-IV	3	3	S-1/ Sarjana	1	
						S-2/ Pascasarjana	2	
		Perencana Ahli Muda	S-1/D-IV	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
		CALON PERENCANA	S-1/D-IV	1	1	S-1/ Sarjana	1	
5	Pelaksana	Operator Layanan Operasional	SMA/ Sederajat	167	58	SD/ Sederajat	55	Meningkatkan pendidikan ke jenjang SMA/
						SMP/	54	

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Eksisting Jabatan	Jumlah Eksisting yang sesuai Syarat Minimal Pendidikan	Eksisting Pendidikan		Rencana Pemenuhan Pendidikan Sesuai Syarat Minimal
						Sederajat		Sederajat
						SMA/ Sederajat	58	
		Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	SMA/ Sederajat	1	1	S-1/ Sarjana	1	
		Penata Layanan Operasional	SMA/ Sederajat	3	3	S-1/ Sarjana	3	
		Penelaah Teknis Kebijakan	SMA/ Sederajat	14	14	D-IV/ Diploma-IV	1	
						S-1/ Sarjana	11	
						S-2/ Pascasarjana	2	
		PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SMA/ Sederajat	1	0	SD/ Sederajat	1	Meningkatkan pendidikan ke jenjang SMA/ Sederajat
		Pengolah Data dan Informasi	SMA/ Sederajat	1	1	D-III/ Sarjana Muda	1	
		Pengadministrasi Perkantoran	SMA/ Sederajat	33	31	SMA/ Sederajat	31	
						SMP/ Sederajat	2	Meningkatkan pendidikan ke jenjang SMA/ Sederajat
Jumlah				242	130		242	

Sumber : Hasil Analisa 2025

Pada tabel 2.5 di atas, terkait rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan formal pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, menggambarkan data yang mencakup jenis jabatan, nama jabatan, syarat minimal pendidikan, jumlah pegawai yang ada, kesesuaian pendidikan dengan persyaratan, serta rekomendasi pengembangan pendidikan lebih lanjut. Dengan demikian, pada tabel tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi aktual kualifikasi pendidikan pegawai sekaligus arah perbaikan yang diperlukan kedepannya. Syarat minimal Pendidikan sesuai dengan ketentuan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4190/8-BM.02.01/SO/K/2024, tanggal 20 juni 2024, Hal: Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Adminstrator memiliki syarat minimal pendidikannya adalah S-1/D-IV. Untuk Jabatan Pengawas memiliki syarat minimal pendidikannya adalah D-III/Sarjana Muda. Untuk Jabatan Fungsional memiliki syarat minimal pendidikannya adalah S-1/D-IV atau D-III/Sarjana Muda. Dan untuk Jabatan Pelaksana syarat minimal pendidikannya adalah SMA/Sederajat.

Tabel 2.6 Rencana Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia Melalui Jalur Pelatihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

No.	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku (Orang)	Nama Pengembangan Kompetensi	Rencana Pengembangan Kompetensi Tahun 2025-2029 (Orang)
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	1
			Pelatihan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1
			Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	1

2		1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1
			Pelatihan Teknis Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Perangkat Daerah	1
	Kepala Bidang Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	Pelatihan Teknis Bidang Lingkungan Hidup	1
	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	Pelatihan Kebijakan Perencanaan Lingkungan Hidup	1
			Pelatihan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1
			Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1
			Pelatihan Teknis Kebijakan Persampahan	1
			Pelatihan Teknis Konvensi Hak Anak	1
			Pelatihan Teknis PBJ Dasar	1
	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	Pelatihan Kebijakan Perencanaan Lingkungan Hidup	1

			Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1
			Pelatihan Teknis Bidang Lingkungan Hidup	1
	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	Pelatihan Kebijakan Perencanaan Lingkungan Hidup	1
			Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1
			Pelatihan Teknis Bidang Lingkungan Hidup	1
3	Kasubag Tata Usaha UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1
			Pelatihan Teknis Ketatausahaan	1
			Pelatihan Teknis PBJ Dasar	1
	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1
			Pelatihan Teknis PBJ Dasar	1
			Pelatihan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
	Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1	Pelatihan Teknis Kebijakan Lingkungan Hidup	1

			Pelatihan Teknis Kebijakan Persampahan	1
			Pelatihan Teknis PBJ Dasar	1
4	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	3	Pelatihan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	3
			Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	3
	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	2	Pelatihan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	2
			Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	2
	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	4	Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	1
			Pelatihan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	4
			Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	2
			Pelatihan Teknis PPK Tipe C	2
	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	1	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	1
	Perencana Ahli Muda	1	Pelatihan Fungsional Perencana	1
5	Penata Layanan Operasional	3	Pelatihan Teknis Manajemen Persampahan	2

	Penelaah Teknis Kebijakan	14	Pelatihan Teknis Lingkungan Hidup	8
			Pelatihan Teknis Manajemen Persampahan	1
			Pelatihan Teknis Manajemen SDM Aparatur	1
			Pelatihan Teknis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
	Pengadministrasi Perkantoran	33	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran	32
	Pengolah Data dan Informasi	1	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran	1
	Jumlah	71		94

Sumber : Hasil Analisa 2025

Pada Tabel 2.6 di atas terkait Rencana Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia Melalui Jalur Pelatihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, berisi gambaran perencanaan program pelatihan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025–2029. Tabel ini memuat data jenis jabatan, nama jabatan, jumlah pegawai yang ada saat ini, rencana pelatihan yang akan diikuti, serta jumlah pegawai yang direncanakan mengikuti pelatihan. Tujuan utama dari tabel ini adalah untuk memastikan setiap jabatan memiliki arah pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui jalur pelatihan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) yang sudah disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah membutuhkan dukungan sarana dan prasarana agar dapat

meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, memastikan kelancaran dan kualitas pelayanan publik, mempermudah koordinasi antar unit, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan kerja pegawai, serta memperpanjang umur pakai aset melalui pemeliharaan yang baik, adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat dalam kelengkapan sarana dan prasarana dan rencana kebutuhan barang dan inventaris kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sampai dengan Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Rencana Pemenuhan Barang Milik Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

No.	Uraian	Kondisi Sampai Dengan 2024 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Buldozer	4	1	0			2	1	1	1	5
2	Wheel Excavator + Attachment	3	0	0			1	1		1	3
3	Excavator	3	0	0			1	1		1	3
4	Dump Truck	198	53	0	5	5	5	5	5	5	30
5	Lain-Lain Hauler	15	1	0						1	1
6	Truck & Bush Tyre	65	41	0			1			1	2
7	Lain-Lain Compacting Equipment	8	1	0			1			1	2
8	Track Loader + Attachment	3	0	0							0
9	Wheel Loader + Attachment	3	1	0			1	1	1	1	4
10	Backhoe Loader	3	0	0			1	1	1	1	4
11	Lain-Lain Loader	10	7	0			2	3	3	2	10
12	Portable Water Pump	14	8	0			3	3	3	3	12
13	Water Purification	4	2	0			1	1		1	3
14	Mesin Bor Tanah	6	2	0			1	1	1	1	4
15	Pick Up	45	30	0			4	4	4	4	16

No.	Uraian	Kondisi Sampai Dengan 2024 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Mosam	65	33	0			8	8	8	8	32
17	Mobil Tangki Air	4	2	0			1	1	1	1	4
18	Mobil Work Shop/Services	2	1	0				1		1	2
19	Kendaraan Derek	1	0	0			1			1	2
20	Gerobak Dorong	120	22	0		200	200	200	200	200	1000
21	Mesin Bor	2	0	0			1			1	2
22	Mesin Gerinda	2	0	0			1			1	2
23	Mesin Kompresor	2	0	0			1	1		1	3
24	Lubricating Set (Perkakas Bengkel Service)	15	0	0			1	1	1	1	4
25	Perlengkapan Bengkel Mekanik	3	0	0			1	1	1	1	4
26	Tripod	1	0	0				1		1	2
27	Floor Crane	1	0	0				1		1	2
28	Perkakas Pengangkat	2	0	0			1			1	2
29	Tool Kit Set	2	0	0			1	1	1	1	4
30	Wheel Chock (Perkakas Standard (standard Tools)	2	0	0			1	1	1	1	4
31	Mesin Bor Listrik Tangan	3	0	0			1	1	1	1	4
32	Global Positioning System	12	6	0			5	5	5	5	20
33	Rak-Rak Penyimpan	5	1	0		1	1	1	1	1	5
34	Lemari Penyimpan	20	11	0		3	3	3	3	3	15
35	Alat Pencacah sampah	35	27	0			2	2	2	2	8
36	Lemari Besi/Metal	14	7	0		2	2	2	2	2	10
37	Rak Besi	60	51	0			2	2	2	2	8
38	Filing Cabinet Besi	62	0	0			1	1	1	1	4
39	Roll Opek	1	0	0							0
40	Lemari Sorok	6	1	0			5	5	5	5	20

No.	Uraian	Kondisi Sampai Dengan 2024 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
41	CCTV - Camera Control Television System	10	0	0			2	2	2	2	8
42	Papan Visual/Papan Nama	10	2	0			1	1		1	3
43	LCD Projector/Infocus	5	2	0			1	1	1	1	4
44	Papan Pengumuman	15	1	0			1			1	2
45	Sice	25	15	0			5	5	5	5	20
46	Meja Rapat	4	3	0			1	1	1	1	4
47	Meja 1/2 Biro	105	61	0			5	5	5	5	20
48	Kursi Rapat	25	0	0			10	10		10	30
49	Kursi Putar	96	50	0			15	15	15	15	60
50	Kursi Biasa	30	10	0			10	10	10	10	40
51	Bangku Tunggu	6	1	0			1	1	1	1	4
52	Kursi Lipat	350	1	0							-
53	Mesin Pemotong Rumput	7	6	0		2	2	2	2	2	10
54	Alat Pembersih	615	157	0		150	150	150	150	150	750
55	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8	6	0			1	1	1	1	4
56	Sepeda Motor	48	36	0		10	10	10	10	10	50
57	Kursi Tamu	14	6	0			3	3		3	9
58	Alat Penghancur Kertas	22	15	0		5	5	5	5	5	25
59	Sofa	25	19	0				2			2
60	Lemari Es	10	4	0			1	1	1	1	4
61	A.C. Split	73	60	0			15	15	15	15	60
62	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	1	0			2	2	2	2	8
63	Exhause Fan	5	3	0			1	1	1	1	4
64	Televisi	15	8	0			1	1	1	1	4
65	Amplifier	2	0	0				1		1	2
66	Megaphone	2	0	0				1			1

No.	Uraian	Kondisi Sampai Dengan 2024 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
67	Sound System	5	3	0			1	1	1	1	4
68	Wireless	4	0	0			1			1	2
69	Equalizer	3	0	0			1			1	2
70	Microphone	5	0	0			5	5	5	5	20
71	Microphone Table Stand	10	0	0			1	1	1	1	4
72	Mic Conference	2	0	0				1		1	2
73	Unit Power Supply	10	1	0				1			1
74	Camera Video	3	0	0				1	1	1	3
75	Timbangan Barang	26	11	0			5	5	5	5	20
76	Tangga Aluminium	4	0	0			1			1	2
77	Dispenser	23	4	0			5	5	5	5	20
78	Handy Cam	2	1	0			1				1
79	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	175	119	0			50	50	50	50	200
80	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	0	0				1			1
81	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	0	0				2		3	5
82	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	0	0				2		2	4
83	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	55	11	0			15	10		10	35
84	Lain-Lain Kursi Kerja Pejabat	23	0	0				1		1	2
85	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	0	0				1		1	2
86	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	8	6	0			2	2		2	6
87	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	39	29	0			2	2	2	2	8
88	Buffet Kaca	4	2	0			1	1	1	1	4
89	Lemari dan Arsip Pejabat	10	1	0			1	1	1	1	4

No.	Uraian	Kondisi Sampai Dengan 2024 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
90	Audio Amplifier	3	0	0			1			1	2
91	Microphone/Wireless MIC	4	0	0				1		1	2
92	Professional Sound System	2	0	0			1			1	2
93	Camera Digital	6	5	0			1	2	2	1	6
94	LCD Monitor	5	0	0			2	1	1	1	5
95	Mesin Pres	26	1	0			1	1	1	1	4
96	Alat Potong Plastik	5	1	0			1	1	1	1	4
97	DO Meter (Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah)	2	1	0			1			1	2
98	Container	45	15	0			3	4	4	4	15
99	Alat Laboratorium Kwalitas Udara	8	4	0			1			1	2
100	P.C Unit	102	75	0			3	4	4	4	15
101	Lap Top	23	1	0			3	3	4	4	15
102	Note Book	38	31	0							-
103	Printer (Peralatan Personal Komputer)	74	59	0			5	5	5	5	20
104	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	26	9	0			2	2	2	3	9
105	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	2	1	0			1			1	2
106	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	88	0	0			4	3	4	4	15
107	Server	4	3	0			1			1	2
108	Genset	5	1	0			1	1	1	1	4
109	Uninterruptible Power Supply (UPS)	15	10	0			2	2	2	3	9
110	Overhead Projector	0	3	0				1			1
111	Sweeper Truck	6	0	0				1	1		2
112	Mobil Unit Derek	2	0	0						1	1

No.	Uraian	Kondisi Sampai Dengan 2024 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
113	Truck Sampah	10	0	0			2	2	1	1	6
114	Alat Pemadam/Portable	35	0	0			7	7	7	7	28
115	Microphone Floor Stand	5	0	0			1	1	1	2	5
116	Computer Compatible	9	8	0							-
117	Alat Ukur	20	17	0			4	4	4	3	15
118	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	6	3	0			1	1	1	2	5
119	Kontainer	120	0	0			4	4	3	3	14
120	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	3	1	0			1			1	2
121	Monitor	7	1	0			1	1	1	1	4
122	Handy Talky (HT)	75	71	0			1	1	2	2	6
123	Plotter (Peralatan Mini Komputer)	4	2	0			1	1			2
124	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2	0	0			4	4	4	3	15
125	Automatic Voltage Regulator (AVR)	5	1	0			1	1			2
126	Tustel	10	9	0			1	1	2	2	6
127	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	3	1	0							-
128	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	70	3	0							-
129	Kursi Tamu di Ruangannya Tunggu Pejabat Eselon II	5	0	0			1	1	1	1	4
130	Stabilisator	3	0	0			1	1	1	1	4
131	Alat Komunikasi Telephone	3	1	0							-
132	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	2	1	0			1			1	2
133	Wireless Amplifier	4	2	0			1			1	2
134	Master Control Desk	2	1	0			1				1

No.	Uraian	Kondisi Sampai Dengan 2024 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
135	Jam Elektronik	2	0	0			1				1
136	Timbangan Orang	2	0	0			1				1
137	Truck Crane	3	1	0							-
138	Gerobak Tarik	200	100	0		200	100	100	200	200	800
139	PH Meter Portable	2	1	0			1				1
140	Software	4	3	0			1	1	1	1	4
141	Filing Cabinet Kayu	60	57	0							-
142	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	2	1	0							-
143	Internet	2	1	0			1	1	1	1	4
144	Band Hidrolik	3	3	0			1	1	1	1	4
145	Hard Disk	10	0	0			3	3	2	2	10
146	HUM/Cable Compensator	2	1	0			1				1
147	Faxsimile	2	1	0							-
148	Head Compensator	1	1	0			1			1	2
149	Reach In Frezzer	2	1	0			1			2	3
150	Tang	1	0	0			1			1	2
151	Camera film	2	0	0							-
152	Drone	1	0	0			1	1		1	3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Tabel 2.8.

Rencana Pemenuhan Barang Milik Daerah Untuk Tanah dan Bangunan

No.	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	0	0				1			1
2	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	0	0				1			1
3	Lain-Lain Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7	0	0				1			1
4	Tanah Lapangan Parkir Beton Konstruksi	0	0	0				1			1
5	Tanah Lapangan Parkir Aspal Konstruksi	0	0	0							3
6	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	10	0	0			2	2	1	2	7
7	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	5	0	0			9	9	5	4	27
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	0	0			2	1	1		4
9	Lain-Lain Bangunan Gedung Kantor	17	0	0			3	3	3		9
10	Lain-Lain Bangunan Gedung Instalasi	7	0	0			3	3	2		8

No.	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Gedung Pos Jaga Permanen	1	0	0			1	1	1		3
12	Lain-Lain Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	22	0	0			2	2	2		6
13	Lain-Lain Bangunan Fasilitas Umum	0	0	0			4	3	3		10
14	Lain-Lain Bangunan Parkir	0	0	0			1	1	1		3
15	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	3	0	0			1	1	1		3
16	Pagar Permanen	1	0	0			2	4	4	4	14
17	Lain-Lain Pagar	2	0	0			4	3	3		10
18	Lain-Lain Tugu/Tanda Batas Lainnya	0	0	0			1	1			2
19	Lain-Lain Jalan Khusus	8	0	0			3	2	2		7
20	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	0	0	0			3	2	2		7
21	Dst Bangunan Pengaman Irigasi	0	0	0			2	2	2	1	7
22	Dst Bangunan Air Irigasi Lainnya	0	0	0			2	2	2	1	7
23	Dst Bangunan Pengaman Sungai/Pantai &	0	0	0			2	1	1	1	

No.	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Penanggulangan Bencana Alam										5
24	Dst Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0	0	0			1	1			2
25	Dst Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	1	0	0					1		1
26	Sumur Artetis	0	0	0			2	2	2		6
27	Dst Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	1	0	0			2	2	2		6
28	Sumur Pengamatan	7	0	0			1	1	1		3
29	Dst Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	1	0	0			1	1			2
30	Dst Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	1	0	0			1	1		1	3
31	Dst Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	0	0	0			1	1	1	1	4
32	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1	0	0			3	3	3		9

No.	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
33	Dst Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0	0	0			5	5	5		15
34	Dst Bangunan Pembawa Air Kotor	1	0	0			1	1			2
35	Bangunan Bak Kontrol/Man Hole	1	0	0			1	1			2
36	Sumur Gali (SGL)	0	0	0			1	1	1		3
37	Sumur Resapan	3	0	0			3	2	2		7
38	Dst Instalasi Air Kotor Lainnya	0	0	0			1	1			2
39	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos	6	0	0			3	3	3	3	12
40	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan	1	0	1			1	1	1	1	4
41	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan	1	0	1			1	1	1	1	4
42	Dst Instalasi Pengolahan Sampah Organik	6	0	0			1	1	1	1	4
43	Dst Bangunan Penampung Sampah	4	0	0			7	7	4	3	21

No.	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
44	Dst Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0	0	0			4	3	3	1	11
45	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	0	0			1	1			2
46	Dst Instalasi Gas Lainnya	0	0	0			5	5	5		15
47	Instalasi Penangkal Petir Manual	0	0	0			2	1	1		4
48	Instalasi AC	0	0	0			1				1
49	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1	0	0			1	1			2
50	Software	3	0	0			1				1
51	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0	0	0			1	1			2
52	Lain-Lain Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0	0	0			2	2	1		5
53	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	0	0	0			3	2	2		7
54	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	0	0	0			2	2	1		5
55	Lain-Lain Bangunan Gedung	2	0	0			1	1	1		3

No.	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tempat Kerja Lainnya										
56	Lain-Lain Bangunan Fasilitas Umum	2	0	0			3	3	2		8
57	Pagar Permanen	0	0	0			2	3	3	2	10
58	Lain-Lain Pagar	1	0	0			3	2	2		7
59	Lain-Lain Tugu/Tanda Batas Lainnya	1	0	0			1	1			2
60	Lain-Lain Jalan Khusus	3	0	0			3	2	2		7
61	Dst Bangunan Pengaman Irigasi	2	0	0			3	3	2		8
62	Dst Bangunan Air Irigasi Lainnya	1	0	0			2	2	1		5
63	Dst Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1	0	0			4	4	4		12
64	Sumur Artetis	1	0	0				1	1		2
65	Dst Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	2	0	0			3	3	2		8
66	Dst Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	1	0	0			2	2	2		6

No.	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
67	Dst Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	0	0			2	2	2		6
68	Dst Bangunan Pembuang Air Kotor	1	0	0			3	3	3	3	12
69	Bangunan Bak Kontrol/Man Hole	0	0	0			1	1	1		3
70	Sumur Gali (SGL)	1	0	0			3	3	3		9
71	Sumur Resapan	0	0	0			2	2	1		5
72	Dst Instalasi Air Kotor Lainnya	1	0	0			4	4	3		11
73	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos	0	0	0			2	2	1	1	6
74	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan	1	0	0			3	3	2		8
75	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0	0	0			2	2	1		5
76	Intalasi Gas Lainnya	1	0	0			3	3	3		9
77	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	0	0	0			2	2	1		5
78	Gedung dan Pengerjaan Dalam	1	0	0							0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Tabel 2.9.
Rencana Pemenuhan Barang Milik Daerah Untuk Layanan Persampahan

No.	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Dump Truck	198	53	0	5	5	5	5	5	5	30
2	Arm Rall	15	1	0				10	10	10	30
3	Lain-Lain Compacting Equipment	8	1	0			1				1
4	Track Loader + Attachment	3	0	0					1		1
5	Pick Up	45	30	0			5	5	4	1	15
6	Mosam	65	33	0			10	10	5	5	30
7	Mobil Work Shop/Services	2	1	0				1			1
8	Kendaraan Derek	1	0	0			1				1
9	Gerobak Dorong	120	22	0		200	200	200	200		800
10	Gerobak Tarik	200	100	0		200	200	200	200		800
10	Dst Intalasi Pengolahan Sampah Organik	6	0	0			2	1	1	1	4
11	Dst Bangunan Penampung Sampah	4	0	0			7	7	7	1	22
12	Dst Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0	0	0			4	3	2	1	10
13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos	0	0	0			2	1	1	1	5
14	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan	1	0	0			3	3	2	2	10

No.	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0	0	0			2	2	1		5
16	Truck Crane	3	1	0							-
17	Container	45	15	0			5	5	4	1	15
18	Sweeper Truck	6	0	0				1	1		2
19	Mobil Unit Derek	2	0	0							1
20	Mesin Bor	2	0	0			1				1
21	Mesin Gerinda	2	0	0			1				1
22	Mesin Kompresor	2	0	0			1	1		1	3
23	Lubricating Set (Perkakas Bengkel Service)	15	0	0			1	1	1		3
24	Perlengkapan Bengkel Mekanik	3	0	0			1	1	1	1	4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Tabel 2.10.

Rencana Pemenuhan Barang Milik Daerah Untuk TPA Galuga

No	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Buldozer	2	1	0			1	1	1	1	4
2	Wheel Excavator + Attachment	3	0	0			1	1			2
3	Excavator	2	1	0			1	1		1	3
4	Backhoe Loader	3	0	0			1	1	1	1	4
5	Mobil Tangki Air	4	2	0			1	1			2

No	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Portable Water Pump	14	8	0				1	1		2
7	Water Purification	4	2	0			1	1			2
8	Mesin Bor Tanah	6	2	0			2	2	2		4
9	Sumur Artetis	1	0	0					1		1
10	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	0	0	0			3	2	2		7
11	Lain-Lain Pagar	1	0	0			3	2	2		7
12	Lain-Lain Tugu/Tanda Batas Lainnya	1	0	0			1	1			2
13	Lain-Lain Jalan Khusus	3	0	0			3	2	2		7
14	Dst Bangunan Pengaman Irigasi	2	0	0			3	3	2		8
15	Dst Bangunan Air Irigasi Lainnya	1	0	0			2	2	1		5
16	Dst Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1	0	0			4	4	4		12
17	Dst Instalasi Air Kotor Lainnya	1	0	0			4	4	3		11
18	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos	0	0	0			2	2	1		5
19	Dst Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	2	0	0			3	3	2		8
20	Dst Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	1	0	0			2	2	2		6

No	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21	Dst Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	0	0			2	2	2		6
22	Dst Bangunan Pembuang Air Kotor	1	0	0			3	3	3		9
23	Bangunan Kontrol/Man Hole Bak	0	0	0			1	1	1		3
24	Sumur Gali (SGL)	1	0	0			3	3	3		9
25	Intalasi Gas Lainnya	1	0	0			3	3	3		9
26	Pagar Permanen	1	0	0			4	3	3	2	12
27	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan	1	0	0			1	1	1	1	4
28	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	0	0				1	1		2
29	Lain-Lain Bangunan Gedung Kantor	1	0	0			3	3	3		9
30	Lain-Lain Bangunan Gedung Instalasi	1	0	0			3	3	2		8
31	Gedung Pos Jaga Permanen	1	0	0					1		1
32	Lain-Lain Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	0	0					1		1
33	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	0	0			1	1	1		3
34	Instalasi AC	0	0	0			1				1
35	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	1	0	0			2	2	1		5

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 20

Tabel 2.11.
Rencana Pemenuhan Barang Milik Daerah di Layanan TPS 3R

No	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Mosam	7	4	3			1	1	1	1	4
2	Alat Pencacah sampah	35	27	0			2	2	3	1	8
3	Alat Pengayak	64	14				2	2	4	2	10
4	Timbangan	32	6				2	2	2	2	8
5	Genset	17						2		1	3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Tabel 2.12.
Rencana Pemenuhan Barang Milik Daerah untuk Layanan
Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)

No	Uraian	Eksisting Barang			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Dump truck						20	10	10	10	50
2	Arm Rall							10	10	10	30
3	Pick up						4	4	4	4	16
4	Mosam					2	5	4	5	4	20
5	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah					1	1	1			3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Tabel 2.13.
Rencana Pemenuhan Sarana Prasarana untuk Pelayanan Publik Dinas
Lingkungan Hidup Kota Bogor

No.	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan		Kondisi sampai dengan 2024			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
		Tidak Ada	Ada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	FASILITAS PENDUKUNG												
1	Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat: terdapat pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan 4 yang diberikan marka.		V	V						1	1		2
2	Petugas parkir		V	V									2
3	Pemeriksaan karcis/kartu parkir	V											-
4	CCTV Lokasi Parkir		V	V					4				8
5	Penitipan jaket/helm		V										2
6	Pelindung (Kanopi/atap bahan lain)		V	V						1			3
B	FASILITAS WAJIB												
1	Kursi tunggu		V	V					2				4
2	Pendingin/sirkulasi ruangan		V	V	70					5			75
C	FASILITAS PELENGKAP												
1	Mesin antrian dilengkapi monitor	V											-
2	Televisi		V	V	V				2	2	2	2	23

[illegible]

No.	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan		Kondisi sampai dengan 2024			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
		Tidak Ada	Ada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Toilet disabilitas	V								1	1		2
7	Loket Prioritas	V											-
8	Ruang tunggu khusus		V										1
9	Guiding block/jalur pemandu	V											-
10	Area parkir khusus		V										
11	Alat bantu	V							5	5			10
12	Arena bermain anak / area ramah anak		V	V						1	1		2
13	Ruang Laktasi		V	V						1			1
14	Petugas Pemandu		V	V						1			1
15	Ruang Tenang		V	V						1			1
F	SARPRAS PENUNJANG												N
1	Fotocopy/ATK		V					1	1	1	1	1	5 Paket
2	P3K		V							5			
3	APAR		V	V						10			15
4	Kantin		V	V									1
5	Ruang Ibadah		V	V									1
6	Jalur evakuasi/titik kumpul		V	V									1
7	Tempat Sampah		V	V				1	1	1	1	1	15
8	Tempat Penitipan Anak/Tempat Bermain Anak		V	V									-
9	CCTV		V	V					4				28

No.	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan		Kondisi sampai dengan 2024			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
		Tidak Ada	Ada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
G	SARANA FRONT OFFICE												
1	Petugas khusus		V	V									1
2	Meja/kursi		V	V						2			8
3	Layar/display informasi		V	V					2	2	2	2	23
4	Bahan cetak informasi layanan		V	V									
5	Register tamu (manual/elektronik)		V						1	1	1	1	5
H	SARANA PRASARANA RUANG KONSULTASI DAN PENGADUAN												
1	Kotak saran/pengaduan	V						1					1
2	Ruang khusus		V					1					1
3	Petugas khusus		V					1					1
4	Air minum/makanan ringan		V										-
5	Register Konsultasi dan Pengaduan		V										2
6	Publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan (poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain)		V	V									2

Tabel 2.14.
 Sistem Informasi yang Digunakan Untuk Pelayanan Dinas
 Lingkungan Hidup Kota Bogor

No	Sistem Informasi Existing				Rencana Pengembangan				
	Nama Sistem	Data yang dihasilkan	Tahun Pembuatan	Instansi Pembuat	2026	2027	2028	2029	2030
1	Sistem Informasi Lingkungan (SIL)	• Data Persampahan • Data Pengujian air sungai, situ dan Limbah • Data Pengujian udara ambien • Data Rintek B3, Persetujuan Lingkungan • Data UKL-UPL, Amdal, SPPL • Data Pengawasan terhadap Kegiatan usaha • Data Pengaduan • Data Lokasi Proklamasi • Data Sekolah Adiwiyata	2016	Dinas Lingkungan Hidup		v			v
2	SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan sampah Nasional)	• Data Timbulan Sampah • Data Persentase Pengurangan sampah • Data Persentase Penanganan sampah	2023	Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia					
3	SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)	Data Perencanaan dan Penganggaran serta penatausahaan Keuangan	2020	Kemendagri					
4	SIMASDA (Sistem Informasi Manajemen Asset Daerah)	Data Perencanaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah	2020	BKAD					
5	SIMPEG (Sistem	Data Kepegawaian		BKPSDM					

No	Sistem Informasi Existing				Rencana Pengembangan				
	Nama Sistem	Data yang dihasilkan	Tahun Pembuatan	Instansi Pembuat	2026	2027	2028	2029	2030
	Informasi Manajemen Kepegawaian)								
6	Sistem Pengukuran Reformasi dan Birokrasi (SURABI)	Data Evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik untuk Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Provinsi Jawa Barat					
7	Sistem Aplikasi Akuntabilitas Pemerintah (SADAYA)	Data Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kinerja dalam rangka Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	2025	Pemerintah Kota Bogor					
8	Sistem Informasi Pelaksanaan Keuangan (KUARTA)	Data penatausahaan keuangan		BRIN					
9	Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIABANG)	Data Realisasi Kinerja Sub Kegiatan		Bagian Adbang Setda Kota Bogor					
10	Sstem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Pengadaan barang dan Jasa		LKPP					
11	Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik	Pengadaan Barang dan Jasa		LKPP					
12	E. Catalog	Pengadaan Barang dan Jasa		LKPP					

No	Sistem Informasi Existing				Rencana Pengembangan				
	Nama Sistem	Data yang dihasilkan	Tahun Pembuatan	Instansi Pembuat	2026	2027	2028	2029	2030
	Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Surat Menyurat		Kominfo					
13	SIBADRA	Pengaduan Masyarakat		Kominfo					
14	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) -Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)	Pengaduan Masyarakat		Kenentrian PAN RB					
15	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)	data Usulan Dana Alokasi Khusus		Kementerian Keuangan RI					
16	Sistem Informasi Aspirasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan (SIAPMANG)	Data Usulan Musrenbang, Usulan Pokok Pikiran DPRD, Renja Perangkat Daerah, Monev kinerja Perangkat Daerah	2022	Bapperida					
17	Website Indeks Inovasi BSKDN	Pelaporan Inovasi Tingkat Nasional dan penghargaan kab/kota/propinsi terinovatif		Kementerian Dalam Negeri					
18	SIKASAI (Sistem Input Bank Sampah Berbasis Aplikasi)	Input data Bank Sampah	2023	Dinas Lingkungan Hidup					

2.1.3. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang merupakan urusan wajib daerah dalam memberikan pelayanan publik bidang lingkungan hidup, digunakan beberapa acuan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun demikian, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karenanya, dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor 2025-2029 ini, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai acuan utama dalam rangka pelayanan publik dibidang lingkungan hidup.
- b. Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, sesuai dengan Amanat undang-undang dasar 1945 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengolahan sampah, pemerintah mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha dan organisasi persampahan, kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, sehingga undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijadikan sebagai acuan didalam pelayanan publik.
- c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah

sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk mengevaluasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama periode tahun 2019-2024, dapat dilihat dari sejauh mana ketercapaian tujuan dan sasaran serta ketercapaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Selain itu kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor juga dapat dilihat dari ketercapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tercermin dari capaian realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra periode sebelumnya yaitu periode 2020-2024 Ketercapaian tersebut secara rutin di monitoring setiap tahunnya yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, secara rinci capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020-2024 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15.
Target dan Realisasi Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
				2020	2020	2020
Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Air yang Berkualitas			Indeks Kualitas Air	49.67	56.33	113.41
	Sasaran : Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar Air		Indeks Kualitas Air	49.67	56.33	113.41
		PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Indeks Kualitas Air (%)	49.67	56.33	113.41
Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Udara yang Berkualitas			Indeks Kualitas Udara	85.9	80.09	93.24
	Sasaran : Terkendalinya sumber-sumber pencemar Udara		Indeks Kualitas Udara	85.9	80.09	93.24
		PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Indeks Kualitas Udara (%)	85.9	80.09	93.24

Tujuan : Terwujudnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup			Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga yang Berperan Aktif dalam Program Penyelamatan Lingkungan	2.7	2.7	100
	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas dan Peran Serta Stakeholder		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga yang Berperan Aktif dalam Program Penyelamatan Lingkungan	2.7	2.7	100
		PROGRAM : MITIGASI DAN PERUBAHAN IKLIM ADAPTASI	Presentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	2.7	2.7	100
			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3.92	3.92	100
Tujuan : Terwujudnya Ruang-Ruang Terbuka Hijau Publik yang Berkualitas di Kawasan Perlindungan Kehati			Persentase Luasan Kawasan Perlindungan Kehati, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Pelestarian Alam yang di Konservasi	0.5	0.5	100

	Sasaran : Meningkatkan Konservasi Lingkungan pada Kawasan Sekitar Mata Air, Sempadan Sungai, Resapan Air, Kehati, Rawan Bencana dan Pelestarian Alam		Luasan Kawasan Perlindungan Kehati, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Pelestarian Alam yang di Konservasi (Ha)	0.5	0.5	100
		PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Presentase peningkatan debit air pada sumber mata air (%)	10	10	100
			Luasan Kawasan Perlindungan Kehati, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Pelestarian Alam yang di Konservasi (Ha)	0,5	0,5	100
Tujuan : Terpenuhinya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Persampahan			Persentase Peningkatan Jalur Wilayah Penyapuan	4.8	4.8	100
	Sasaran : Meningkatkan Pengelolaan Sampah Mulai dari Sumber		Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	75.87	77.2	101.8
			Persentase Reduksi Sampah	6.4	7.61	118.91
		PROGRAM : PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R	Persentase Reduksi Sampah	6.4	7.61	118.91

		PROGRAM : PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	75.87	77.2	101.8
		PROGRAM : PERBAIKAN, OPTIMALISASI, OPERASIONAL, DAN PEMELIHARAAN FUNGSI TPA	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	75.87	77.2	101.8
Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	3.2	3.2	100
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	3.2	3.2	100
		PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	3.2	3.2	100
		PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	3.2	3.2	100

Tujuan : Terwujudnya Kemudahan akses Layanan SDA dan LH			Tujuan : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100
	Sasaran 4 : Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup untuk kepentingan pengendalian Pembangunan		Sasaran : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100
		PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase data dan informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh public secara mudah dan berkualitas	100	100	100

Sumber Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Tabel 2.16.
Target dan Realisasi Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
				2021	2021	2021
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,64	54,53	105,96
	Terkendalinya sumber-sumber pencemar		Sasaran 1 : Indeks Kualitas Air	49,70	64,72	130,22
			Sasaran 2 : Indeks Kualitas udara	86,0	99,35	115,52
		PROGRAM 2.11.06 : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	30	38,13	127,1
		PROGRAM 2.11.10 : PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan	100	100	100

			Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti			
		PROGRAM : 2.11.03 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	49,70	64,72	130,22
			Indeks Kualitas Udara	86	99,35	115,520
			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	5.87	5.87	100
		PROGRAM 2.11.05 : PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	40	40	100
		PROGRAM 2.11.03 : PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	20	31,17	155,85
		PROGRAM 2.11.09 :	Persentase Sekolah Adiwiyata (%)	33	33	100

		PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
			Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan	6,62	16,9	255,29
		PROGRAM 2.11.04 : PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,5	0,5	100
	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	74,50	81,19	108,98
			Persentase Reduksi Sampah	6,60	7,85	118,94
		PROGRAM 1.03.04 : PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dibangun	0.01	0.01	100
			Persentase TPA/TPST/SPA/TPS	0.02	0.02	100

			- 3R yang direhabilitasi			
			Persentase TPA/TPST/SPA/TPS - 3R yang ditingkatkan	100	100	100
			Persentase Sarana Persampahan yang terpenuhi	100	100	100
		PROGRAM 2.11.11 : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)	6,60	7,85	118,94
			Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	74,50	81,19	108,98
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48.8	48.8	100
			Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	2.1	3,30	157,14
Tujuan 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor		Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (nilai)	BB	BB	BB

			Indikator Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	NA	NA	NA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	BB	BB	BB
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	3.20	3.34	104,38
Tujuan 3 : Terwujudnya Kemudahan akses Layanan SDA dan LH	Sasaran 3 : Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup untuk kepentingan pengendalian Pembangunan		Tujuan : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100
			Sasaran : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100

		PROGRAM 2.11.02 : PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	100	100
--	--	--	---	-----	-----	-----

Sumber Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Tabel 2.17.
Target dan Realisasi Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2022-2024

[illegible]

				Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti										
		Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	PROGRAM : 2.11.03 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	36.17	37.17	38.17	51.39	46.67	50.89	142.07	125.56	133.32	
				Indeks Kualitas Udara	79.63	79.72	79.81	98.36	95.92	86.51	123.52	120.32	108.39	
				Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7.11	7.72	7.98	7.98	7.72	8.22	112.23	100.00	103.01	
		Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	PROGRAM 2.11.05 : PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	50	60	70	60	65	70	120	108.33	100.00	
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Kegiatan/ Usaha Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	PROGRAM 2.11.03 : PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	30	40	50	31.49	50	52.48	104.97	125.00	104.96	

		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga yang melakukan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	PROGRAM 2.11.09 : PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata (%)	35	36	38	35.41	35.56	38	101.17	98.78	100.00
				Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan	7,94	9.26	10.59	16.8	18.98	22.18	211.58	204.97	209.44
			PROGRAM 2.11.04 : PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	100	100.00	100.00
	Sasaran 2: Meningkatkan Pelayanan Persampahan			Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77	77.5	78	81.35	79.08	81.4	105.65	102.04	104.36
				Persentase Reduksi Sampah	6,80	7	7.2	7.8	7.81	7.93	114.7	111.57	110.14

		Terbangunnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan	PROGRAM 1.03.04 : PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang dibangun	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	100	100.00	100.00
				Persentase TPA/TPST/SPA/TPS - 3R yang direhabilitasi	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	100	100.00	100.00
				Persentase TPA/TPST/SPA/TPS - 3R yang ditingkatkan	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
				Persentase Sarana Persampahan yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pengolahan sampah di sumber	PROGRAM 2.11.11 : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)	6,80	7	7.2	7.8	7.81	7.93	114.7	111.57	110.14
				Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	77	77.5	78	81.35	79.08	81.4	105.65	102.04	104.36
				Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48.8	48.8	48.8	48.8	48.8	73.75	100	100.00	151.13
				Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	2.1	2.1	2.1	2.1	2.9	2.96	100	138.10	140.95

Tujuan 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor			Indikator Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (nilai)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
				Nilai PMPRB di Lingkungan Perangkat daerah	81.01	81	82	NA	82.6	82	NA	101.98	100
		Meningkatnya pelaksanaan penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pelaporan dan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A	A	A
				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	3.35	3.4	3.5	3.4	3.5	3.61	101.49	102.941	103.143

				Lingkup Perangkat daerah									
Tujuan 3 : Terwujudnya Kemudahan akses Layanan SDA dan LH	Sasaran 3 : Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup untuk kepentingan pengendalian Pembangunan			Tujuan : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
				Sasaran : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	PROGRAM 2.11.02 : PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00

Sumber Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada Tahun 2020-2024 memiliki 6 (enam) Indikator Utama yaitu:

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Persentase Volume sampah terangkut ke TPA
4. Persentase Reduksi sampah
5. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup
6. Persentase data dan informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh publik secara mudah dan berkualitas

Pada akhir Renstra Tahun 2024, semua indikator mencapai target Capaian paling tinggi adalah Indikator Indeks Kualitas air yang mencapai 133.32%. Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan Indeks Kualitas air adalah :

1. kewajiban untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan baik yang berasal dari kegiatan masyarakat ataupun dari kegiatan usaha. Selain itu juga bagi air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ serta jika air limbah yang sudah diolah tidak dapat dibuang ke badan air permukaan terdekat, maka pilihan lain dalam membuang air limbah adalah dengan bekerja sama dengan pihak lain yang mengolah air limbah atau memanfaatkannya kembali untuk menyiram tanaman atau untuk penyiraman toilet.
2. Melaksanakan pemantauan lanjutan terhadap air sungai dan situ secara periodik untuk memantau efektifitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran kualitas air permukaan di kota Bogor.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap air sungai dan situ terutama terhadap pengelolaan air limbah
4. Memberikan sanksi hukum kepada pelaku pencemaran di sekitar situ dan sungai apabila melakukan pembuangan limbah langsung tanpa pengolahan
5. Memberikan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat diberbagai kalangan (pelajar, ibu rumah tangga, pegawai, kelompok pemuda/karang taruna) tentang arti lingkungan hidup sehingga lebih mencintai lingkungan hidupnya serta memberlakukan sanksi/tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan

Tabel 2.18.
Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2020

NO	URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2020		CAPAIAN	
				NILAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	NILAI	ANGGARAN
1	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	NA	Rp45,815,287,014	NA	Rp43,424,192,047
		Pengelolaan Rumah Tangga PD	Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Peralatan dan Kebutun Rumah Tangga SKPD ()	100	Rp6,762,947,014	100	Rp4,842,727,677
		Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM non PNS Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1272	Rp39,052,340,000	1272	Rp38,581,464,370
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	100	Rp6,253,768,400	100	Rp6,017,813,182
		Pengadaan Inventaris Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal sebagai pendukung Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	3	Rp69,550,000	3	Rp65,077,000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpeliharamya sarana dan prasarana inventaris kantor	2	Rp780,600,000	2	Rp726,603,542
		Peningkatan Pelayanan Perbengkelan	Pemeliharaan Rutin	1	Rp5,384,638,400	1	Rp5,226,132,640
		Pengadaan Gedung dan Bangunan	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal sebagai pendukung Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	2	Rp18,980,000	2	-
2	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampaan	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	76	Rp11,649,111,500	76	Rp11,218,339,210

			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,80	-	48,80	-
			Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	2,10	-	2,10	-
		Pelayanan Persampahan	Terangkutnya Sampah di Wilayah Kota Bogor	76	Rp10,057,266,500	76	Rp9,666,522,610
		Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	RASIONALISASI	100	-
		Pembangunan Revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	5 revitalisasi, 30 pemeliraan	RASIONALISASI	5 revitalisasi, 30 pemeliraan	-
		Pelombaan Kebersihan	Terciptanya dan Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan	100	Rp449,118,000	100	Rp447,563,100
		Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah	Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan Sampah 100	100	Rp252,000,000	100	Rp252,000,000
		Peningkatan PAD Retribusi Persampahan	Meningkatnya PAD dari Retribusi Persampahan	100	Rp90,727,000	100	Rp89,959,000
		Penyediaan Sarana Kebersihan Kota (Dana Hibah Pariwisata)		100	Rp800,000,000	100	Rp762,294,500
		Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliraan Fungsi TPA	Persentase Volume Sampah yang diolah di TPA	98,16	Rp18,647,538,500	98,16	Rp17,176,820,760
			Kapasitas Pengolahan Sampah	931	-	931	-
		Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terpenuhinya BBM untuk 6 Alat Berat, 1 Truk Tangki Air, 2 kendaraan Operasional dan 2 Motor Sampah	1	Rp8,190,754,000	1	Rp7,345,245,000
		Pengelolaan Sampah di TPA	Terkelolanya sampah di TPA Galuga	1	Rp3,387,974,500	1	Rp3,199,890,460

		Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga	Tercapainya Perbaikan Sarana dan Prasarana TPA yang Tertuang dalam Perjanjian Kerjasama MoU tentang Perpanjangan TPA Galuga	5	Rp2,250,600,000	5	Rp1,949,811,500
		Pengadaan Alat Berat	Kebutuhan Operasional di TPA Galuga dalam Meningkatkan Kinerja Persampahan di TPA Galuga	1	Rp4,724,810,000	1	Rp4,589,939,600
		Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	Tersusunnya Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	10	Rp93,400,000	10	Rp91,934,200
		Perencanaan Teknis Proses Penutupan TPA Galuga	Tersedianya Kajian Teknis Pembuangan dan Pengelolaan sampah ke TPAS Nambo	1	RASIONALISASI	1	-
		Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Persentase Reduksi Sampah ()	6,40	Rp643,190,000	6,40	Rp628,942,750
			Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	4	-	4	
		Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	Tersedianya Infrastruktur dan Sarana Prasarana TPS 3R Berbasis Masyarakat	1	RASIONALISASI	1	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 3R	70	RASIONALISASI	70	-
		Pengelolaan Sampah dengan 3R	Tereduksi dan Terolahnya Sampah di Sumber	19	Rp140,800,000	19	Rp138,238,000
		Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah	15	Rp502,390,000	15	Rp490,704,750
		Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Tersedianya Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarkat (Bondongan dan Genteng)	2	RASIONALISASI	2	-

		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan lingkungannya	50	Rp554,942,000	50	Rp541,612,000
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran udara yang ditindaklanjuti	NA		NA	
			Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik	NA		NA	
			Persentase Kegiatan/Usaha yang Berpotensi sebagai Sumber Pencemar Air yang melakukan Pengelolaan Lingkungan sesuai dengan Lingkungannya	NA		NA	
			Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Air/Kerusakan Sumber-Sumber Air yang ditindaklanjuti	NA		NA	
			Persentase yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	NA		NA	
			Persentase Pemenuhan Kualitas Air Permukaan Dalam Kondisi Baik dan/atau Tercemar Ringan	NA		NA	
		Pembinaan Limbah B3	Pembinaan Limbah B3	40	RASIONALISASI	40	-
		Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL	Terbinanya Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan/atau Usa di Kota Bogor	250	Rp85,360,000	250	Rp82,692,500

			Meningkatnya Wawasan Para Pelaku Usaha/Kegiatan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	400		400	
			Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan/Usaha di Kota Bogor	3		3	
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan terhadap yang Memiliki Perizinan	102	RASIONALISAS I	102	-
			Jumlah yang Membuat Perizinan Setelah dilakukan Pengawasan	38		38	
			Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan Wilayah I	50		50	
			Terlaporkannya sil Penyelesaian Kasus Lingkungan Wilayah I	100		100	
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan terhadap yang Memiliki Perizinan	102	RASIONALISAS I	102	-
			Jumlah yang Membuat Perizinan Setelah dilakukan Pengawasan	38		38	
			Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan Wilayah II	50		50	
			Terlaporkannya sil Penyelesaian Kasus Lingkungan Wilayah II	100		100	
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan terhadap yang Memiliki Perizinan	102	RASIONALISAS I	102	-
			Jumlah yang Membuat Perizinan Setelah dilakukan Pengawasan	38		38	

			Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan Wilayah III	50		50	
			Terlaporkannya sil Penyelesaian Kasus Lingkungan Wilayah III	100		100	
		Pengendalian Pencemaran Air	Tersedianya Data kualitas air sungai dan situ pada musim penghujan, musim peralihan dan kemarau	108	Rp183,032,000	108	Rp176,887,000
			Tersedianya Data kualitas air limbah usaha dan/atau kegiatan pada triwulan 1, 2, dan 3	150		150	
			Tersedianya Data kualitas air sumur didekat sumber pencemar	50		50	
			Tersedianya Data kualitas air limbah sanitasi komunal	1		1	
			Tersedianya Pengujian dan Analisa Kualitas Air	4		4	
			Terlaksananya BinteK Pengendalian Pencemaran Air	1		1	
			Terlaksananya Pelatihan Penginputan Data pada Web Nawasis Info	1		1	
			Tersedianya Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar serta Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Cisadane	1		1	
			Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Cisadane	1		1	

			Tersedianya Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar serta Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Cisadane	1		1	
		Pengendalian Pencemaran Udara	Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara aktif 24 jam	24	Rp286,550,000	24	Rp282,032,500
			Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive	8		8	
			Data pengujian emisi sumber tidak bergerak	7		7	
			Tersedianya Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	3		3	
			Tersedianya Pengujian dan Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan	2		2	
		Identifikasi Timbulan Sampah Limbah B3	Tersedianya Identifikasi Timbulan Sampah B3	1	RASIONALISASI	1	-
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman yati yang dikonservasi ()	5	Rp46,988,000	5	Rp46,349,750
		Pengelolaan Sumber Daya Air	Terpeliharanya Peralatan Sumur Pantau	5	Rp46,988,000	5	Rp46,349,750
			Terbangunnya sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	35		35	
			Terpeliharanya sumur resapan yang terbangun	50		50	
			Terbangunnya sumur resapan	35		35	

			Tersedianya Perencanaan Sumur Resapan dan pembangunan sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	1		1	
			Tersusunnya perencanaan pembangunan Sumur Resapan	1		1	
			Terlaksananya pengawasan pembangunan Sumur Resapan				
			Terlaksananya pengawasan Pemeliharaan Sumur Resapan				
			Terlaksananya pengawasan pembangunan sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	1		1	
			Tersusunnya Inventarisasi Sumber Mata Air Kota Bogor	1		1	
			Tersusunnya Kajian Sumur Resapan	1		1	
		Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Tanaman	800	RASIONALISASI	800	
			Pupuk	48		48	
			Terpeliranya sil penanaman	1		1	
			Pengukuran Cadangan Karbon	1		1	
		Naturalisasi Ciliwung-Pembuatan Sumur Resapan (Bankeu Prov DKI 2020)	Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur	182	RASIONALISASI	182	
			Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Tengah	91		91	
			Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Utara	182		182	
			Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Tanah Sareal	93		93	

			Terpeliharanya Sumur Resapan yang Sudah Terbangun	90		90	
			Perencanaan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Utara dan Tanah Sareal	1		1	
			Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Sumur Resapan yang Telah Terbangun	1		1	
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur	1		1	
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Tengah	1		1	
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Utara	1		1	
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Tanah Sareal	1		1	
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi	1	Rp77,020,000	1	Rp76,600,000
		Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Tersedianya Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kota Bogor	1	Rp77,020,000	1	Rp76,600,000
		Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	RASIONALISASI	1	-

		Program Mitigasi dan Adaptasi Peruban Iklim	Persentase adiwiyata ()	31	Rp123,940,000	31	Rp107,695,000
			Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komas Lingkungan	100	-	100	-
			Persentase Penurunan Emisi GRK	3,92	-	3,92	-
		Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim	Terbinanya Kampung Iklim dalam Rangka Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1	RASIONALISASI	1	-
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Tersedianya Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Bogor ()	1	RASIONALISASI	1	-
		Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata	Terbinanya Adiwiyata	200	Rp10,500,000	200	-
		Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Lingkungan Hidup, Adiwiyata dan Program Adipura	3	Rp113,440,000	3	Rp107,695,000
JUMLAH			Rp83,811,785,414		Rp79,238,364,699		

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup 2025

Tabel 2.19.
Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

NO	URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021		CAPAIAN	
				NILAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	NILAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	0.01	Rp 16,961,649,750	0.01	Rp 16,584,890,135
			Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	0.02		0.02	
			Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	100		100	
			Persentase Sarana persampahan yang terpenuhi	100		100	
		Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	100	Rp 16,961,649,750	100	Rp 16,584,890,135
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	NA	Rp -	NA	Rp -
		Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	NA	Rp -	NA	Rp -
		Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	NA	Rp 9,459,293,750	NA	Rp 9,101,529,385
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	BB	Rp 83,638,700,366	BB	Rp 81,073,038,988
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	3.2		3.34	

		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH	BB	Rp -	BB	Rp -
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Rp -	3	Rp -
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Rp -	7	Rp -
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	Rp 32,950,085,848	100	Rp 31,820,629,987
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	Rp 32,950,085,848	NA	Rp 31,820,629,987
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	Rp 1,862,252,200	100	Rp 1,722,838,524
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	Rp 200,000,000	NA	Rp 177,368,800
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	NA	Rp 76,551,600	NA	Rp 59,169,300
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NA	Rp 1,378,598,800	NA	Rp 1,312,417,740
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	NA	Rp 114,452,600	NA	Rp 98,033,600
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	Rp 92,649,200	NA	Rp 75,849,084
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	NA	Rp -	NA	Rp -
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	NA	Rp -	NA	Rp -

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Rp 43,243,492,208	100	Rp 42,843,250,563
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp 263,202,640	12	Rp 245,864,631
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp 42,980,289,568	12	Rp 42,597,385,932
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100	Rp 5,582,870,110	100	Rp 4,686,319,914
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	Rp 4,931,300,000	100	Rp 4,103,789,997
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Rp 500,000,110	100	Rp 434,809,307
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Rp 151,570,000	100	Rp 147,720,610
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	Rp 549,999,930	100	Rp 522,616,000
		Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	100	Rp 549,999,930	100	Rp 522,616,000
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	100	Rp 549,999,930	100	Rp 522,616,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Indeks Kualitas Air	35.17	Rp 1,227,165,400	49.7	Rp 1,189,001,075
			Indeks Kualitas Udara	79.532		86	

		KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	5.87		5.87	
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	NA	Rp 944,565,400	NA	Rp 912,730,275
			Persentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	NA		NA	
			Persentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan/usaha	NA		NA	
			Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	3		3	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	Rp 767,750,000	2	Rp 740,090,275
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Rp 176,815,400	1	Rp 172,640,000
		Kegiatan Pemulihan dan/atau Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1	Rp 282,600,000	1	Rp 276,270,800
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisas dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	Rp 282,600,000	1	Rp 276,270,800
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0.5	Rp 53,406,000	0.5	Rp 46,936,000
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi	NA	Rp 53,406,000	0.3	Rp 46,936,000

		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	NA	Rp 53,406,000	NA	Rp 46,936,000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	45	Rp 399,296,000	40	Rp 369,284,375
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	45	Rp 399,296,000	40	Rp 369,284,375
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		Rp 399,296,000	1	Rp 369,284,375
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	30	Rp 339,244,600	30	Rp 325,499,400
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dan/ atau Usaha berizin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehubungan atas ketaatan terhadap dokumen dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan	118	Rp 339,244,600	118	Rp 325,499,400
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	NA	Rp 250,000,000	NA	Rp 238,594,800

		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	NA	Rp 89,244,600	NA	Rp 86,904,600
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	100	-	100	-
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	1	-	1	-
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	20	Rp 529,288,600	20	Rp 499,642,100
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan	90	Rp 529,288,600	90	Rp 499,642,100
			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	20		20	
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	NA	Rp 316,790,000	NA	Rp 298,043,100
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	NA	-	NA	-

		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	NA	Rp 212,498,600	NA	Rp 201,599,000
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	6.62	Rp 533,800,000	6.62	Rp 527,506,800
			Persentase sekolah Adiwiyata (%)	33		33	
		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT/Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	250	Rp 533,800,000	250	Rp 527,506,800
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16	Rp 533,800,000	16	Rp 527,506,800
		PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Persentase Reduksi Sampah (%)	6.6	Rp 17,092,899,600	6.6	Rp 22,676,237,560
			Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	76.5		74.5	
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48.8		48.8	
			Persentase peningkatan retribusi persampahan	2.1		2.1	
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	NA	Rp 17,092,899,600	NA	Rp 22,676,237,560
			Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	NA		NA	
			Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	76.50		74.50	

		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	NA	Rp 1,651,913,100	NA	Rp 1,578,522,772
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	522.50	Rp 10,655,432,250	522.50	Rp 9,873,725,000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	7	Rp 4,785,554,250	7	Rp 4,337,318,001
JUMLAH					Rp 121,325,450,246		Rp 116,927,980,646

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Selanjutnya berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Peraturan WaliKota Bogor Nomor 57 Tahun 2019 tentang Renstra Bappeda 2019-2024, sebelum dilakukan perubahan, hasil evaluasi capaian kinerja pada Tahun 2020-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.20.
Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022-2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional				Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Persentase	0.01	16,000,000	0.01	18,075,000,000	0.01	19,850,000,000	0.01	19,152,341,089	0.01	12,262,241,571	0.01	13,142,241,164	100.00	100.00	100.00
				Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	Persentase	0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		100.00	100.00	100.00
				Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	Persentase	100		100		100		100		100		100		100.00	100.00	100.00
				Persentase Sarana persampahan yang terpenuhi	Persentase	100		100		100		100		100		100		100.00	100.00	100.00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota			Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Persentase	100	16,000,000	100	18,075,000,000	100	19,850,000,000	100	19,152,341,089	100	12,262,241,571	100	13,142,241,164	100.00	100.00	100.00
		Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Pekerjaan Pembangunan TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Rumah Tangga	3300	250,000,000	3300	300,000,000	3850	350,000,000	3300	1,333,243,500	3300	110,349,220	3850	534,060,497	100.00	100.00	100.00
		Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pekerjaan Rehabilitasi TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang Direhabilitasi	Unit	10	250,000,000	10	275,000,000	10	300,000,000	10	179,982,030	10	275,310,638	10	1,619,722,822	100.00	100.00	100.00
		Peningkatan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	- Belanja Obat Bahan Kimia - Belanja Alat Kebersihan - Belanja Obat-Obatan dan Belanja Tenaga Kesehatan untuk Pengobatan rutin di sekitar TPA Galuga - Belanja Jasa Keamanan dan Ketertiban di TPA Galuga - Pelaksanaan Fogging di sekitar TPA - Pelaksanaan Penyemprotan Lalat - Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup 2 Semester	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Rumah Tangga	306266	10,000,000,000	321580	11,000,000,000	337658	12,000,000,000	306266	9,778,786,015	321580	9,598,540,060	337658	1,448,427,828	100.00	100.00	100.00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	- Pengadaan Sapu Lidi - Gerobak Sampah - Tempat Sampah beroda 1100 Liter - Tong Sampah Terpilah Fiber - Tempat Sampah beroda 660 Liter - Tempat Sampah Terpilah Steanless - Kantong Sampah Portable - Kantong Kompos - Arm Roll Truck - Compastor Truck - Dump Truck - Whell Loader - Bak Kontainer - Motor Sampah - Pick Up Dump - Mini Sweaper - Electrical Hand Push Sweaper	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Unit	128	5,500,000,000	145	6,500,000,000	150	7,200,000,000	128	7,860,329,544	145	2,278,041,653	150	9,540,030,017	100.00	100.00	100.00
Program Pengelolaan Persampahan				Persentase Reduksi Sampah	Persentase	6.8	19,525,000,000	7	21,700,000,000	7.2	24,250,000,000	7.8	21,371,263,670	7.81	18,787,077,600	7.98	8,805,338,321	114.71	111.57	110.83
				Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	Persentase	77		77.5		78		81.35		79.03		81.4		105.65	101.97	104.36
				Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	Persentase	48.8		48.8		48.8		48.8		48.8		73.75		100.00	100.00	151.13
				Persentase peningkatan retribusi persampahan	Persentase	2.1		2.1		2.1		2.1		2.86		2.96		100.00	136.19	140.95

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
	Pengelolaan Sampah			Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	Persentase	100	19,525,000,000	100	21,700,000,000	100	24,250,000,000	100	21,371,263,670	100	18,787,077,600	100	8,805,338,321	100.00	100.00	100.00
				Persentase Pengelolaan sampah organik yang dikelola di Bank Sampah	Persentase	50		50		50		50		55		56		100.00	110.00	112.00
				Persentase volume sampah terangkut ke TPA	Persentase	77		77.5		78		81.35		79.03		81.4		105.65	101.97	104.36
		Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	- Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan (Karung Plastik) - Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan TPS 3R - Jasa Uji Kualitas Laboratorium - Jasa Konsultasi Perencanaan Bangunan Gedung TPS 3R - Pemeliharaan Bangunan Gedung TPS 3R - Jasa Konsultasi Pengawasan Bangunan Gedung TPS 3R - Pokir Jasa Konsultan (Kajian Potensi Rumah Tangga), (Kajian Potensi Sampah Pasar)	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	2	1,375,000,000	3	1,400,000,000	3	1,550,000,000	2	999,015,488	2	1,007,768,836	2	1,121,217,751	100.00	66.67	66.67

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	- Penutupan Lahan /Zona Dengan Tanah (Controlled Landfill) - Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone) - Perencanaan Controoled Landfill, - Pengawasan Controlled Landfill, - Perencanaan Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA, - Pengawasan Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA - Pemeliharaan Gedung dan Hanggar Kantor TPA - Pemeliharaan Gedung Kompos - Pemeliharaan Hanggar Alat Berat - Pemeliharaan Jembatan Timban - Rehabilitasi Hanggar Tangki BBM - Pengadaan Exavator 1 unit - Pengadaan Bulldozer 1 unit - Pembangunan Taman Area Emplacement dan Hanggar Tangki - Perencanaan Pembangunan Taman TPA, - Pengawasan Pembangunan Taman TPA - Pembangunan Pagar Tembok Pembatas, - Perencanaan Pembangunan Pagar Temok Pembatas, - Pengawasan Pembangunan Pagar Tembok Pembatas - Pembangunan dan Perbaikan Jalan Area TPA,	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	525	13,000,000,000	526	14,300,000,000	530	15,700,000,000	525	15,606,377,610	525	17,068,225,300	525	7,496,465,570	100.00	99.81	99.06

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
		Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Pengadaan jaring dan terpal untuk angkutan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	8	5,150,000,000	8	6,000,000,000	9	7,000,000,000	8	4,765,870,572	8	711,083,464	8	187,655,000	100.00	100.00	88.89
Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Air	Point	36.17	1,430,000,000	37.17	1,560,000,000	38.17	1,750,000,000	51.39	935,143,400	46.67	994,442,205	50.89	1,003,026,950	142.08	125.56	133.32
				Indeks Kualitas Udara	Point	79.63		79.72		79.81		98.36		95.92		86.51		123.52	120.32	108.39
				Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase	7.11		7.72		7.98		7.98		7.72		8.22		112.24	100.00	103.01

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	Persentase	60	1,100,000,000	60	1,200,000,000	60	1,350,000,000	60	839,513,800	60	906,476,005	60	908,035,800	100.00	100.00	100.00
				Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	Persentase	90		90		90		90		90		90		100.00	100.00	100.00
				Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan/ usaha	Persentase	90		90		90		90		90		90		100.00	100.00	100.00
				Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	Lokasi	3		3		3		5		4		3		166.67	133.33	100.00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	- Uji Kualitas Air Limbah Kegiatan Usaha - Uji Air Limbah Domestik (Sanimas 20 Lokasi) - Pengujian Air Sungai dan Situ Musim Kemarau (36 titik) - Pengujian Air Sungai dan Situ Musim Penghujan (36 titik) - Pengujian Kualitas Udara Ambien Musim Penghujan - Pengujian Kualitas Udara Ambien Musim Kemarau - Uji emisi Kendaraan Bermotor - Pengujian Kebauan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2	850,000,000	2	900,000,000	2	1,000,000,000	2	643,260,050	2	737,451,800	4	773,069,100	100.00	100.00	200.00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	- Barang yang diserahkan kepada masyarakat di lokasi Pembinaan Proklam - Sosialisasi dan Pembinaan Proklam - Jasa Konsultansi Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	250,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	1	196,253,750	1	169,024,205	2	134,966,700	100.00	100.00	200.00
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	Laporan	1	330,000,000	1	360,000,000	1	400,000,000	1	95,629,600	1	87,966,200	1	94,991,150	100.00	100.00	100.00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	- Jasa Konsultansi - Penyusunan Dokumen Tutupan Lahan Kota Bogor - Penanaman Pohon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisas dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1	330,000,000	1	360,000,000	1	400,000,000	1	95,629,600	1	87,966,200	1	94,991,150	100.00	100.00	100.00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)				Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	Persentase	50	400,000,000	60	450,000,000	70	450,000,000	60	156,219,995	60	178,816,175	70	128,585,907	120.00	100.00	100.00
	Penyimpanan Sementara Limbah B3			Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	Persentase	50	400,000,000	60	450,000,000	70	450,000,000	60	156,219,995	60	178,816,175	70	128,585,907	120.00	100.00	100.00
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	- Belanja Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 - Kajian Sistem Tanggap Darurat dalam pengelola B3 dan Limbah B3 - Sosialisasi mengenal Sampah Spesifik Rumah Tangga - Belanja Tempat Sampah Beroda untuk limbah B3	Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	Persentase	50	400,000,000	60	450,000,000	70	450,000,000	1	156,219,995	1	178,816,175	1	128,585,907	2.00	1.67	1.43

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				Persentase peanggun jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan olerh Pemerintah Kabupaten/Kot a	Persentase	34	415,000,000	38	450,000,000	39	470,000,000	54.55	126,681,397		77,159,000	58	148,664,540	160.44	0.00	148.72
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Kegiatan dan/ atau Usaha berizin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehubungan atas ketaatan terhadap dokumen dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan	Keg/Usaha	134	415,000,000	149	450,000,000	156	470,000,000	134	126,681,397	147	77,159,000	50	148,664,540	100.00	0.00	32.05

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	60,717,450	1	77,159,000	1	148,664,540	100.00	0.00	100.00
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengujian dan Analisa Kualitas Air Limbah Kegiatan Usaha	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	1	250,000,000	1	250,000,000	1	270,000,000	1	65,963,947	1	77,159,000	1	148,664,540	100.00	100.00	100.00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				Jumlah pokmas peduli lingkungan yang aktif	Pokmas	NA		NA		NA		NA	673,216,320	NA	409,122,050	NA	441,529,020			

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
				Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan	Persentase	30		40		50										
				Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha								31.49		40.38		52.48				
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			Persentase Pelaku Kegiatan/ usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan	Persentase	90	1,000,000,000	90	1,100,000,000	90	1,200,000,000	90	673,216,320	92	409,122,050	58	441,529,020	100.00	102.22	64.44

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
				Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	Lembaga	20		25		30		30				100		150.00	0.00	333.33
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumiah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	8	350,000,000	10	400,000,000	10	450,000,000	6	333,933,670	10	166,313,150	10	244,269,800	75.00	100.00	100.00
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Belanja Jasa Konsultan Kajian Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	50	300,000,000	50	350,000,000	50	400,000,000	50	97,557,400	50	53,644,000	50	7,171,500	100.00	100.00	100.00
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Acara Kampanye dan Hari Besar Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/	Orang	200	350,000,000	300	350,000,000	250	350,000,000	200	241,725,250	300	189,164,900	300	190,087,720	100.00	100.00	120.00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
				Kegiatan yang terlibat																
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan Hidup	Persentase	7.94	700,000,000	9.26	850,000,000	10.59	1,000,000,000	16.8	531,079,900	18.98	529,978,600	22.18	498,275,500	211.59	204.97	209.44
				Persentase sekolah adiwiyata	Persentase	35		36		38		35.41		35.56		38.61		101.17	98.78	101.61
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah R1/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	R1/ Dunia Usaha/ Sekolah/ KSM	300	700,000,000	300	850,000,000	300	1,000,000,000	30	531,079,900	782	529,978,600	380	498,275,500	10.00	260.67	126.67

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Penyelenggaraan Acara Bogorku Bersih - Pembinaan Adiwiyata	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	16	700,000,000	16	850,000,000	16	1,000,000,000	16	531,079,900	24	529,978,600	5	498,275,500	100.00	150.00	31.25
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	Persentase	100	250,000,000	100	270,000,000	100	300,000,000	100	33,079,500	100	9,456,000	100	28,700,988	100.00	100.00	100.00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota			Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	250,000,000	100	270,000,000	100	300,000,000	100	33,079,500	100	9,456,000	100	28,700,988	100.00	100.00	100.00
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengujian dan Analisa Kualitas Air Limbah bagi kegiatan usaha yang diadukan oleh masyarakat	Jumlah laporan pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	Laporan	100	250,000,000	100	270,000,000	100	300,000,000	1	33,079.500	1	9,456,000	1	28,700,988	1.00	1.00	1.00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Ha	0.5	150,000,000	0.5	250,000,000	0.5	350,000,000	0.516	146,875,750	0.5	143,056,900	0.5	146,912,340	103.20	100.00	100.00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi	Persentase	0.3	150,000,000	0.3	250,000,000	0.3	350,000,000	0.516	146,875,750	0.3	143,056,900	0.3	146,912,340	172.00	100.00	100.00
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	- Jasa Konsultansi Kajian Database Keanekaragaman Hayati Kota Bogor	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	1	150,000,000	1	250,000,000	1	350,000,000	1	146,875,750	1	143,056,900	1	146,912,340	100.00	100.00	100.00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup				Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	Persentase	100	600,000,000	100	1,350,000,000	100	750,000,000	100	517,549,700	100	560,450,250	100	662,159,300	100.00	100.00	100.00
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota			Persentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Persentase	100	600,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	517,549,700	100	320,594,500	100	223,606,300	100.00	100.00	100.00
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH	Dokumen	1	600,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	100	517,549,700	100	320,594,500	100	223,606,300	10000.00	10000.00	10000.00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH	Nilai	A	300,000,000	A	300,000,000	A	300,000,000	A	218,577,900	A	117,488,600	A	118,379,300			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Penyusunan LKIP DLH 2. Penyusunan LKPJ DLH 3. Penyusunan Laporan Monev RKPD Triwulan 1,2,3, 4 dan Tahunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3			-		-	3	99,516,600		-		-	100.00		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Rencana Kerja 2. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan 3. Penyusunan Penilaian Risiko 4. Penyusunan Renstra Tahun 2027-2032 5. Penyusunan Dokumen RKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	119,061,300	9	117,488,600	1	118,379,300	100.00	128.57	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Persen	100	32,756,207,000	100	33,756,207,000	100	34,756,207,000	100	31,592,499,728	100	29,872,887,978	100	35,036,612,859	100.00	100.00	100.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di lingkup DLH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	302	32,756,207,000	302	33,756,207,000	302	34,756,207,000	302	31,592,499,728	302	29,872,887,978	302	34,946,272,859	100.00	100.00	100.00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan											1	90,340,000			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	Persen	100	3,018,220,000	100	3,702,750,000	100	4,727,681,000	100	925,407,640	100	1,346,316,700	100	1,671,447,267	100.00	100.00	100.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	- Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Kertas dan Cover - Belanja Materai - Belanja Peralatan Komputer - Belanja Jas Hujan - Petugas Lapangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	396,991,000	1	317,593,000	1	496,239,000	1	98,831,625	1	405,880,500	1	846,657,600	100.00	100.00	100.00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	9,568,000,000	5	119,610,000	5	149,513,000	5	86,083,200	5	62,024,492	5	79,427,850	100.00	100.00	100.00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1,722,475,000	2	2,154,059	2	2,692,574	2	291,046,040	2	285,833,000	2	322,835,000	100.00	100.00	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	- Belanja Barang Cetak (Buku Daftar Rincian Pemakaian BBM, Buku Permohonan Alat Kebersihan, Buku Serah Terima Arsip, Buku Permohonan Penggantian Sparepart Kendaraan Dinas, Buku Permohonan Penggantian Oli Kendaraan Dinas, Buku Kendali Surat Masuk dan Surat Keluar) - Belanja Penggandaan - Belanja Penjilidan - Belanja Spanduk	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang Disediakan	Paket	4	143,065,000	2	178,832,000	2	223,540,000	2	96,568,900	2	89,878,300	2	94,374,000	50.00	100.00	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Barat Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	746,121,000	1	932,656,000	1	1,165,815,000	1	352,877,875	1	502,700,408	1	328,152,817	100.00	100.00	100.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Persen	100	463,000,000	100	533,000,000	100	817,800,000	100	153,893,001	100	340,983,600	100	586,415,000	100.00	100.00	100.00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Belanja Modal Pendingin Ruangan - Belanja Modal Kursi Kerja - Belanja Modal Kursi Kerja - Belanja Modal Webcam - Belanja Modal Soundsytem - Belanja Modal Mic Conference - Belanja Modal Microphone Wireless - Belanja Modal Camera - Belanja Modal Handy Talky (TPA) - Belanja Modal PC - Belanja Modal Laptop - Belanja Modal Scanner - Belanja Modal Printer	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	463,000,000	10	533,000,000	12	613,000,000	4	153,893,001	10	340,983,600	12	586,415,000	40.00	100.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	45,608,373,000	100	48,051,467,000	100	50,402,467,000	100	43,315,630,647	100	41,836,510,126	100	41,557,178,277	100.00	100.00	100.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memfasilitasi pembayaran listrik, air, telepon, internet/ tv langganan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	816,373,000	12	1,020,467,000	12	1,020,467,000	3	294,013,555	12	311,195,929	12	343,781,087	25.00	100.00	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji Non ASN (TKK, PKWT, Satpam, Pengemudi dan BPJS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	44,792,000,000	12	47,031,000,000	12	49,382,000,000	3	43,021,617,092	12	41,525,314,197	12	41,213,397,190	25.00	100.00	100.00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	Persen	100	8,062,000,000	100	8,405,000	100	8,965,000	100	646,317,819	100	1,073,005,904	100	23,122,564,084	100.00	100.00	100.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional meliputi BBM, penggantian suku cadang, pengecatan atau body repair, service berkala, penggantian oli, pembelian dan pemeliharaan asesoris kendaraan, Pembayaran pajak kendaraan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	100	6,862,000,000	135	7,205,000,000	135	7,565,000,000	50	333,022,924	135	306,388,198	135	22,410,440,632	50.00	100.00	100.00
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor DLH meliputi ruangan bidang-bidang , kamar mandi dll	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	600,000,000	1	600,000,000	1	700,000,000	1	163,666,645	1	629,310,811	1	468,918,807	100.00	100.00	100.00
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan (AC) - Pemeliharaan CCTV - Pemeliharaan PC, Laptop dan Printer - Pemeliharaan Alat Penghancur kertas - Pemeliharaan Sound Sytem - Pemeliharaan APAR - Pemeliharaan Lampu Gantung / Hias	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	6	600,000,000	10	600,000,000	10	700,000,000	2	149,628,250	10	137,306,895	10	243,204,645	33.33	100.00	100.00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Capaian (%)		
			- Pemeliharaan Alat-alat Elektronik (TV, Kulkas, Dispenser, Infokus, DLL)																	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2025

Pada tabel di atas terkait Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2020-2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor melaksanakan 11 program, 16 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Pada tahun 2024 dari 11 program yang dilaksanakan, semuanya sudah mencapai target. Sebanyak 16 kegiatan telah mencapai target. Sedangkan untuk 32 sub kegiatan yang dilaksanakan seluruhnya mencapai target sub kegiatan. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya penambahan aktivitas pada sub kegiatan yang mendongkrak atas capaian kegiatan dan program.

Capaian sub kegiatan indikator kinerja utama adalah :

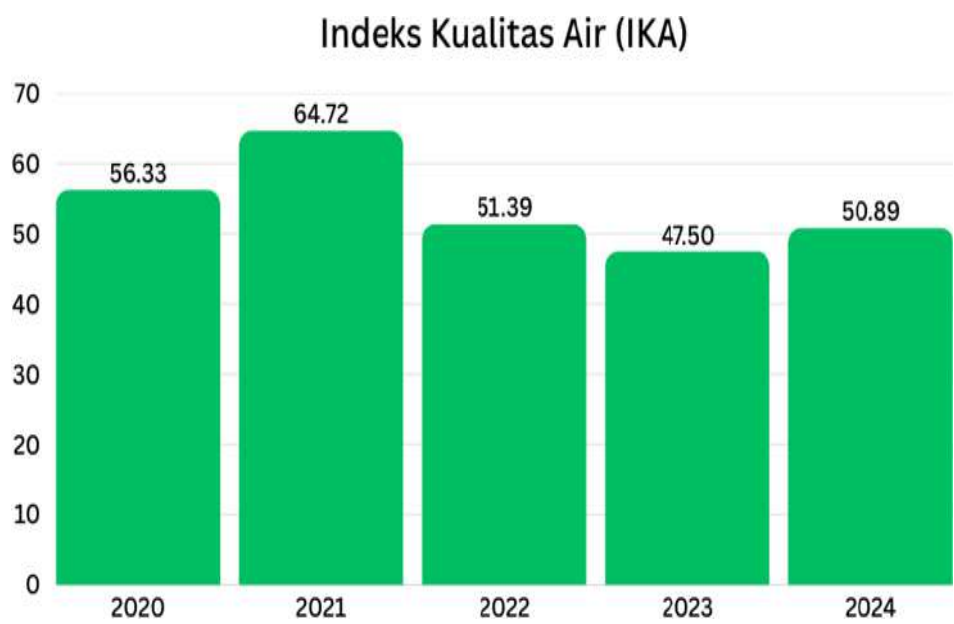
1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Menurut hasil perhitungan metode Indeks Pencemaran (IP) dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021, pada pemantauan Musim Penghujan Tahun 2024 menunjukkan air sungai dalam kondisi Baik, Tercemar Sedang, dan Tercemar Ringan. Sedangkan hasil pemantauan pada musim kemarau Tahun 2024 menunjukkan seluruh titik pemantauan air sungai masuk dalam kategori Tercemar Ringan (TR).

Menurut hasil perhitungan, pada pemantauan Musim Penghujan Tahun 2024 menunjukkan air situ dalam kondisi Tercemar Ringan. Sedangkan hasil pemantauan pada musim kemarau Tahun 2024 menunjukkan seluruh titik pemantauan air situ masuk dalam kategori Tercemar Ringan dan Tercemar Sedang.

IKA mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dimulai dari 56,33 pada tahun 2020, naik ke 64,72 pada tahun 2021, lalu turun kembali hingga 47,5 pada tahun 2023, dan sedikit membaik menjadi 59,34 pada tahun 2024.

Gambar 2.2. Grafik Perbandingan Indeks Kualitas Air tahun 2020 sampai dengan 2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2025

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat digambarkan dengan Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat.

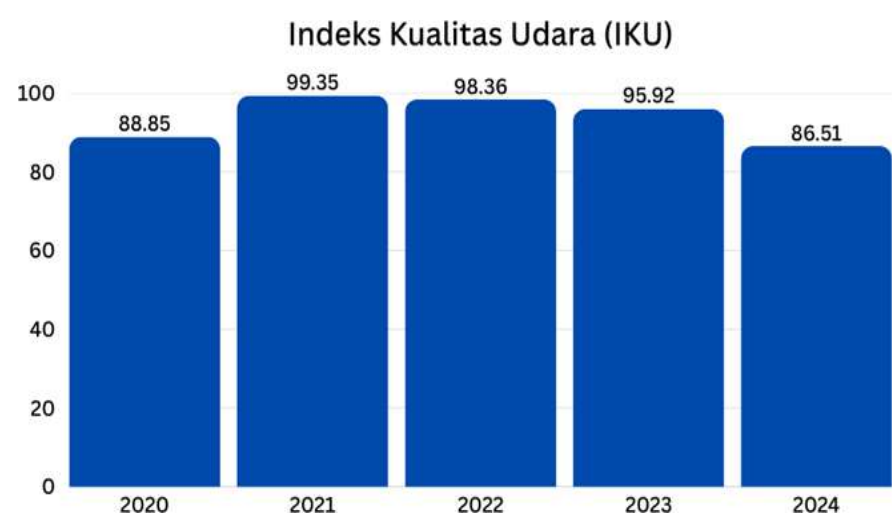
Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode manual aktif, menunjukkan bahwa kualitas udara parameter SO2, CO, NO2, O3, NMHC, TSP, Pb, PM10 dan PM2,5 di semua lokasi pemantauan memenuhi baku mutu berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis kebauan menunjukkan bahwa kebauan parameter NH3 dan H2S di 10 (sepuluh) lokasi pemantauan (Kelurahan Cilendek, Kelurahan Cimahpar, Perumahan Baranangsiang, Terminal Bubulak, Tugu Pertigaan Narkoba, Pertigaan Empang, DPRD Kota Bogor, Terminal Damri, Stasiun Bogor dan PT. Nutrifood) memenuhi baku mutu berdasarkan KepMen LH No. 50 Tahun 1996. Dan berdasarkan pengukuran kebisingan menunjukkan bahwa kebisingan di 10 (sepuluh) lokasi pengukuran berkisar antara 51 - 72 dBA. Kebisingan dibedakan berdasarkan klasifikasi yang terdiri dari sub urban dengan hasil pengukuran berkisar antara 51 –

54 dBA, roadside berkisar antara 53– 72 dBA, pusat kota sebesar 65-68 dBA dan industri sebesar 51 dBA.

Jika berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode passive sampler yang dilakukan pada musim kemarau tahun 2024 di 4 (empat) lokasi pemantauan yaitu Cilendek Timur, pos polisi (Pertigaan Tugu Narkoba), Bank Jabar Banten dan PT Good Year menunjukan hasil bahwa kualitas udara juga masih memenuhi baku mutu udara.

IKU mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai puncaknya sebesar 99,35, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga 86,51 pada tahun 2024.

Gambar 2.3. Grafik Perbandingan Indeks Kualitas Udara tahun 2020 sampai dengan 2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2025

3. Persampahan

Volume sampah yang besar di kota-kota seperti Kota Bogor merupakan faktor penting dalam masalah perkotaan. Kepadatan penduduk menyebabkan peningkatan signifikan dalam volume sampah, yang memicu berbagai masalah seperti pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat yang terganggu, dan manajemen limbah yang tidak efisien. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan banjir, penyumbatan saluran air, dan kerusakan ekosistem. Selain itu, pembuangan sampah yang tidak teratur juga

dapat merusak estetika kota dan menurunkan kualitas hidup penduduk.

Faktor Pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024, pemetaan permasalahan dan tindaklanjut penyelesaian permasalahannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.21.
Target dan Realisasi Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Target					Realisasi					Capaian (%)					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	55,45	54,53	52.35	53.44	54.53	55,45	54,53	64.29	58.4	59.68	100	100	122.8	109.28	109.44	Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup	Edukasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan	Jika terjadi peningkatan kepadatan penduduk, maka akan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup	Melakukan pemantauan kualitas air dan udara
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	76	74.5	75	75.2	75.5	77.2	81.19	81.32	79.03	81.4	101.58	108.98	108.43	105.09	107.81	Peran aktif masyarakat, kesadaran	Rendahnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang benar, kurangnya infrastruktur dan fasilitas pengolahan sampah	Menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara, berkembang biaknya penyakit,	meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperbaiki sistem pengelolaan sampah, serta menerapkan teknologi yang tepat seperti daur

																				ulang dan pengelolaan sampah menjadi energi.
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	26	30	34	38	39	37	30	30	39	58	100	100	88.82	102.63	148.72	Penyusunan Rencana	SDM yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas seperti Personil PPLH dan PPNS masih minim	Ketaatan penanggungja wab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH belum optimal	Pemberian sanksi administratif sesuai dengan Permen LH no 14 tahun 2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2025

Tabel 2.22.
Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pelayanan 2020

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Capaian (%)	Kategori	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
				2020	2020				
Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Air yang Berkualitas			Indeks Kualitas Air	113.41	Sangat Baik	Kewajiban mengolah air limbah sebelum dibuang	Masih adanya usaha dan kegiatan yang kurang peduli terhadap pengelola lingkungan	Masih adanya kegiatan/ usaha yang belum menaati/ mematuhi aspek lingkungan sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.	Melakukan Pemantauan kualitas air
	Sasaran : Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar Air		Indeks Kualitas Air	113.41	Sangat Baik	Kewajiban mengolah air limbah sebelum dibuang	Masih adanya usaha dan kegiatan yang kurang peduli terhadap pengelola lingkungan	Masih adanya kegiatan/ usaha yang belum menaati/ mematuhi aspek lingkungan sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.	Melakukan Pemantauan kualitas air

		PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Indeks Kualitas Air (%)	113.41	Sangat Baik	Kewajiban mengolah air limbah sebelum dibuang	Masih adanya usaha dan kegiatan yang kurang peduli terhadap pengelola lingkungan	Masih adanya kegiatan/ usaha yang belum menaati/ mematuhi aspek lingkungan sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.	Melakukan Pemantauan kualitas air
Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Udara yang Berkualitas			Indeks Kualitas Udara	93.24	Sangat Baik	Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor gratis	Emisi gas-gas berbahaya dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran bahan bakar fossil.	Masih adanya sumber pencemar udara yang harus ditangani	Melakukan pemantuan kualitas udara
	Sasaran : Terkendalinya sumber-sumber pencemar Udara		Indeks Kualitas Udara	93.24	Sangat Baik	Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor gratis	Emisi gas-gas berbahaya dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran bahan bakar fossil.	Masih adanya sumber pencemar udara yang harus ditangani	Melakukan pemantuan kualitas udara

		PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Indeks Kualitas Udara (%)	93.24	Sangat Baik	Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor gratis	Emisi gas-gas berbahaya dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran bahan bakar fossil.	Masih adanya sumber pencemar udara yang harus ditangani	Melakukan pemantuan kualitas udara
Tujuan : Terwujudnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup			Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga yang Berperan Aktif dalam Program Penyelamatan Lingkungan	100	Sangat Baik	Adanya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat/Kom unitas yang bergerak di dalam pengelolaan sampah dan lingkungan yang dapat menjadi agen penggerak masyarakat di sekitarnya	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Masih Rendahnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan lingkungan
	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas dan Peran Serta Stakeholder		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga yang Berperan Aktif dalam Program Penyelamatan Lingkungan	100	Sangat Baik	Adanya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat/Kom unitas yang bergerak di dalam pengelolaan sampah dan lingkungan yang dapat menjadi	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Masih Rendahnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan lingkungan

						agen penggerak masyarakat di sekitarnya			
		PROGRAM : MITIGASI DAN PERUBAHAN IKLIM ADAPTASI	Presentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	100	Sangat Baik	Adanya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat/Kom unitas yang bergerak di dalam pengelolaan sampah dan lingkungan yang dapat menjadi agen penggerak masyarakat di sekitarnya	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Masih Rendahnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan lingkungan
			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	100	Sangat Baik	Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam)	Kurangnya Partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan ramah lingkungan	Meningkatnya pencemaran/ kerusakan LH yang menyebabkan Perubahan Iklim	Melaksanakan daur ulang sampah melalui program 3R
Tujuan : Terwujudnya Ruang-Ruang Terbuka Hijau Publik yang Berkualitas di Kawasan Perlindungan			Persentase Luasan Kawasan Perlindungan Kehati, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Pelestarian Alam yang di Konservasi	100	Sangat Baik	Mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara	Keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau	Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau	Melaksanakan penanaman pohon di kawasan konservasi

Kehati									
	Sasaran : Meningkatnya Konservasi Lingkungan pada Kawasan Sekitar Mata Air, Sempadan Sungai, Resapan Air, Kehati, Rawan Bencana dan Pelestarian Alam		Luasan Kawasan Perlindungan Kehati, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Pelestarian Alam yang di Konservasi (Ha)	100	Sangat Baik	Mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara	Keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau	Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau	Melaksanakan penanaman pohon di kawasan konservasi
		PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Presentase peningkatan debit air pada sumber mata air (%)	98	Sangat Baik	Menyediakan air bersih bagi masyarakat	Berada di lahan pribadi milik warga	Alih fungsi daerah konservasi air	Kegiatan fisik pembangunan dialihkan ke Dinas PUPR
			Luasan Kawasan Perlindungan Kehati, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Pelestarian Alam yang di Konservasi (Ha)	0,5	Sangat Baik	Mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara	Keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau	Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau	Melaksanakan penanaman pohon di kawasan konservasi
Tujuan : Terpenuhinya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Persampahan			Persentase Peningkatan Jalur Wilayah Penyapuan	100	Sangat Baik	Sudah dibuat jalur penyapuan	Disiplin kerja para penyapu jalan	masih ada area wilayah yang belum terlewati jalur penyapuan	Pengawasan dan monitoring kepada penyapu jalan

	Sasaran : Meningkatkan Pengelolaan Sampah Mulai dari Sumber		Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	101.75	Sangat Baik	Tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah	Rendahnya volume timbulan sampah yang diolah	Sarana dan prasarana persampahan yang rusak	Pengolahan sampah di TPA
			Persentase Reduksi Sampah	118.91	Sangat Baik	Pengelolaan sampah skala rumah tangga	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah	Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	Sosialisasi/Ed ukasi pengelolaan sampah
		PROGRAM : PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R	Persentase Reduksi Sampah	118.91	Sangat Baik	Pengelolaan sampah skala rumah tangga	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah	Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	Sosialisasi/Ed ukasi pengelolaan sampah
		PROGRAM : PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	101.75	Sangat Baik	Tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah	Rendahnya volume timbulan sampah yang diolah	Sarana dan prasarana persampahan yang rusak	Pengolahan sampah di TPA
		PROGRAM : PERBAIKAN, OPTIMALISASI, OPERASIONAL, DAN PEMELIHARAAN FUNGSI TPA	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	101.75	Sangat Baik	Tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah	Rendahnya volume timbulan sampah yang diolah	Sarana dan prasarana persampahan yang rusak	Pengolahan sampah di TPA

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang Efektif, Effisien dan Akuntabel			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	100	Sangat Baik	Telah disusun SKM DLH	Masih ada yang tidak mau mengisi SKM	Pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan SKM secara rutin setiap tahun
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	100	Sangat Baik	Telah disusun SKM DLH	Masih ada yang tidak mau mengisi SKM	Pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan SKM secara rutin setiap tahun
		PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	100	Sangat Baik	Telah disusun SKM DLH	Masih ada yang tidak mau mengisi SKM	Pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan SKM secara rutin setiap tahun
		PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	100	Sangat Baik	Telah disusun SKM DLH	Masih ada yang tidak mau mengisi SKM	Pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan SKM secara rutin setiap tahun
Tujuan : Terwujudnya Kemudahan akses Layanan SDA dan LH			Tujuan : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	Sangat Baik	Terbangunnya Sistem Informasi Lingkungan hidup	Web yang susah di akses	Masing kurangnya Ketersediaan data dan informasi Lingkungan hidup	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan

	Sasaran 4 : Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup untuk kepentingan pengendalian Pembangunan		Sasaran : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	Sangat Baik	Terbangunnya Sistem Informasi Lingkungan hidup	Web yang susah di akses	Masing kurangnya Ketersediaan data dan informasi Lingkungan hidup	Pemeliharaan dan Pengembang an Sistem Informasi Lingkungan
		PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase data dan informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh public secara mudah dan berkualitas	100	Sangat Baik	Terbangunnya Sistem Informasi Lingkungan hidup	Web yang susah di akses	Masing kurangnya Ketersediaan data dan informasi Lingkungan hidup	Pemeliharaan dan Pengembang an Sistem Informasi Lingkungan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2025

Tabel 2.23.
Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pelayanan 2021

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Capaian (%)	Kategori	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
				2021	2021				
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	105,96	Sangat Baik	Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup	Edukasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan	Jika terjadi peningkatan kepadatan penduduk, maka akan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup	Melakukan pemantauan kualitas air dan udara
	Terkendalinya sumber-sumber pencemar		Sasaran 1 : Indeks Kualitas Air	130,22	Sangat Baik	Kewajiban mengolah air limbah sebelum dibuang	Masih adanya usaha dan kegiatan yang kurang peduli terhadap pengelola lingkungan	Masih adanya kegiatan/ usaha yang belum menaati/ mematuhi aspek lingkungan sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.	Melakukan Pemantauan kualitas air

			Sasaran 2 : Indeks Kualitas udara	115,52	Sangat Baik	Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor gratis	Emisi gas-gas berbahaya dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil.	Masih adanya sumber pencemar udara yang harus ditangani	Melakukan pemantuan kualitas udara
		PROGRAM 2.11.06 : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	127,1	Sangat Baik	Penyusunan Rencana	SDM yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas seperti Personil PPLH dan PPNS masih minim	Ketaatan penanggungjawa b usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH belum optimal	Pemberian sanksi administratif sesuai dengan Permen LH no 14 tahun 2024
		PROGRAM 2.11.10 : PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100	Sangat Baik	Setiap aduan yang masuk selalu ditindaklanjuti	Identitas pelapor tidak ditemukan di SIBADRA	Saat verifikasi pengaduan tidak ada yang objek diadukan	Melakukan verifikasi lapangan beserta aparatur wilayah

		PROGRAM : 2.11.03 : PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	130,22	Sangat Baik	Kewajiban mengolah air limbah sebelum dibuang	Masih adanya usaha dan kegiatan yang kurang peduli terhadap pengelola lingkungan	Masih adanya kegiatan/ usaha yang belum menaati/ mematuhi aspek lingkungan sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.	Melakukan Pemantauan kualitas air
			Indeks Kualitas Udara	115,520	Sangat Baik	Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor gratis	Emisi gas-gas berbahaya dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil.	Masih adanya sumber pencemar udara yang harus ditangani	Melakukan pemantuan kualitas udara
			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	100	Sangat Baik	Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim)	Kurangnya Partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan ramah lingkungan	Meningkatnya pencemaran/ kerusakan LH yang menyebabkan Perubahan Iklim	Melaksanakan daur ulang sampah melalui program 3R

		PROGRAM 2.11.05 : PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	100	Sangat Baik	Kegiatan/usaha memiliki Rintek B3 dalam pengelolaan limbah B3	Belum semua penghasil limbah B3 memiliki tempat penyimpanan limbah B3 yang dilengkapi dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku	Belum Optimalnya Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengawasan dan pengendalian limbah B3 yang dihasilkan;
		PROGRAM 2.11.03 : PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	155,85	Sangat Baik	Adanya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat/Kom unitas yang bergerak di dalam pengelolaan sampah dan lingkungan yang dapat menjadi agen penggerak masyarakat di sekitarnya	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Masih Rendahnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan lingkungan
		PROGRAM 2.11.09 : PENGHARGAA N LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata (%)	100	Sangat Baik	Sosialisasi Adiwiyata ke sekolah-sekolah	Kurangnya kesadaran warga sekolah akan lingkungan	Sekolah merasa bahwa program Adiwiyata masih sukarela belum menjadi kewajiban	Melaksanakan Sosilisasi Adiwiyata ke sekolah-sekolah

			Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan	255,29	Sangat Baik	Pembentukan Bank sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan	Masih rendahnya masyarakat yang peduli lingkungan	Melaksanakan lomba Bogorku Bersih
		PROGRAM 2.11.04 : PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	100	Sangat Baik	Mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara	Keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau	Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau	Melaksanakan penanaman pohon di kawasan konservasi
	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	Sasaran 2 : Meningkatkan Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	108,98	Sangat Baik	Tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah	Rendahnya volume timbulan sampah yang diolah	Sarana dan prasarana persampahan yang rusak	Pengolahan sampah di TPA
			Persentase Reduksi Sampah	118,94	Sangat Baik	Pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan sistem 3R	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah	Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	memperbanyak fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R

		PROGRAM 1.03.04 : PENGEMBANGA N SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang dibangun	100	Sangat Baik	Mengurangi volume sampah ke TPA	Terbatasnya lahan untuk Pembangunan TPS/TPS 3R	Terjadinya penumpukan sampah	Melaksanakan Pembangunan TPS/TPS 3R
			Persentase TPA/TPST/SPA/ TPS - 3R yang direhabilitasi	100	Sangat Baik	Mengurangi volume sampah ke TPA	Kepemilikan lahan	Adanya TPS yang sudah mengalami kerusakan	Melaksanakan optimisasi TPS
			Persentase TPA/TPST/SPA/ TPS - 3R yang ditingkatkan	100	Sangat Baik	Mengurangi volume sampah ke TPA	Metoda pengelolaan sampah di TPA Galuga masih semi control landfill	Beban pencemaran sampah di sekitar TPA	Melaksanakan optimisasi TPA Galuga
			Persentase Sarana Persampahan yang terpenuhi	100	Sangat Baik	Armada persampahan yang dimiliki DLH	Banyak armada persampahan yg sudah berumur	Diperlukan peremajaan armada pengangkutan sampah	Peremajaan armada pengangkut sampah
		PROGRAM 2.11.11 : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)	118,94	Sangat Baik	Pengelolaan sampah skala rumah tangga	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah	Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	Sosialisasi/Eduk asi pengelolaan sampah

			Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	108,98	Sangat Baik	Tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah	Rendahnya volume timbulan sampah yang diolah	Sarana dan prasarana persampahan yang rusak	Pengolahan sampah di TPA
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	100	Sangat Baik	Sudah dibuat jalur penyapuan	Disiplin kerja para penyapu jalan	masah ada area wilayah yang belu terlewati jalur penyapuan	Pengawasan dan monitoring kepada penyapu jalan
			Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	157,14	Sangat Baik	kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah	Masih ada wilayah yang belum ditarik retribusi sampahnya	Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat	adanya penambahan wilayah pelayanan
Tujuan 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor		Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (nilai)	BB	Baik	Tingginya nilai AKIP	Kurangnya pemahaman SDM akan peraturan penilaian Indeks RB	Kurangnya koordinasi antar bidang	Koordinasi antar bidang dalam satu dinas
			Indikator Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan	NA	NA	Tingginya nilai AKIP	Kurangnya pemahaman SDM akan peraturan penilaian Indeks RB	Kurangnya koordinasi antar bidang	Koordinasi antar bidang dalam satu dinas

			Hidup						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	BB	Baik	Telah dilaksanakan koordinasi antar bidang	Belum terlaksananya pelaporan monitoring dan evaluasi kegiatan	Dokumen perencanaan dan Pelaporan belum tersusun dengan baik	Koordinasi antar bidang dalam satu dinas
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	104,38	Sangat Baik	Telah disusun SKM DLH	Masih ada yang tidak mau mengisi SKM	Pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan SKM secara rutin setiap tahun
Tujuan 3 : Terwujudnya Kemudahan akses Layanan SDA dan LH	Sasaran 3 : Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup untuk kepentingan pengendalian Pembangunan		Tujuan : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	Sangat Baik	Terbangunnya Sistem Informasi Lingkungan hidup	Web yang susah di akses	Masing kurangnya Ketersediaan data dan informasi Lingkungan hidup	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan
			Sasaran : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah	100	Sangat Baik	Terbangunnya Sistem Informasi Lingkungan hidup	Web yang susah di akses	Masing kurangnya Ketersediaan data dan informasi Lingkungan hidup	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan

			dan berkualitas						
		PROGRAM 2.11.02 : PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	Sangat Baik	Telah disusun Dokumen RPPLH dan KLHS	Sulitnya mencari data	Diperlukan kajian strategi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Melaksanakan FGD terkait pengelolaan lingkungan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2025

Tabel 2.24.
Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pelayanan 2022-2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Capaian Tertinggi dan Terendah 2020-2024			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
				2022	2023	2024				
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Sasaran 1 : Terkendalinya kualitas air dan udara		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	122.8	109.28	109.44	Peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan	Pencemaran limbah domestik dan industri	Jika terjadi peningkatan kepadatan penduduk, maka akan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup	Melakukan pemantauan kualitas air dan udara
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	122.8	109.28	109.44	Peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan	Pencemaran limbah domestik dan industri	Jika terjadi peningkatan kepadatan penduduk, maka akan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup	Melakukan pemantauan kualitas air dan udara

		PROGRAM 2.11.06 : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	88.82	102.63	148.72	Adanya kegiatan pengawasan ke pada kegiatan dan atau usaha	SDM yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas seperti Personil PPLH dan PPNS masih minim	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH belum optimal	Pemberian sanksi administratif sesuai dengan Permen LH no 14 tahun 2024
		PROGRAM 2.11.10 : PENANGAN N PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100	100.00	100.00	Setiap aduan yang masuk ditindaklanjuti	Identitas pelapor tidak ditemukan di SIBADRA	Saat verifikasi pengaduan tidak ada objek diadukan	Melakukan verifikasi lapangan beserta aparaturnya
		PROGRAM : 2.11.03 : PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	142.07	125.56	133.32	Kewajiban mengolah air limbah sebelum dibuang	Masih adanya usaha dan kegiatan yang kurang peduli terhadap pengelola lingkungan	Masih adanya kegiatan/ usaha yang belum menaati/ mematuhi aspek lingkungan sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.	Melakukan Pemantauan kualitas air

			Indeks Kualitas Udara	123.52	120.32	108.39	Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor gratis	Emisi gas-gas berbahaya dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil.	Masih adanya sumber pencemar udara yang harus ditangani	Melakukan pemantauan kualitas udara
			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	112.23	100.00	103.01	Adanya Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam)	Semakin banyak pengguna kendaraan bermotor	Meningkatnya pencemaran/ kerusakan LH yang menyebabkan Perubahan Iklim	Melaksanakan daur ulang sampah melalui program 3R
		PROGRAM 2.11.05 : PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	120	108.33	100.00	Kegiatan/usaha memiliki Rintek B3 dalam pengelolaan limbah B3	Belum semua penghasil limbah B3 memiliki tempat penyimpanan limbah B3 yang dilengkapi dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku	Belum Optimalnya Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengawasan dan pengendalian limbah B3 yang dihasilkan;

		PROGRAM 2.11.03 : PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	104.97	125.00	104.96	Adanya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat/Komunitas yang bergerak di dalam pengelolaan sampah dan lingkungan yang dapat menjadi agen penggerak masyarakat di sekitarnya	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Masih Rendahnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan lingkungan
		PROGRAM 2.11.09 : PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata (%)	101.17	98.78	100.00	Sosialisasi Adiwiyata ke sekolah-sekolah	Kurangnya kesadaran warga sekolah akan pengelolaan lingkungan	Sekolah merasa bahwa program Adiwiyata masih sukarela belum menjadi kewajiban	Melaksanakan Sosialisasi Adiwiyata ke sekolah-sekolah
			Persentase Rukun Tetangga Lingkungan peduli	211.58	204.97	209.44	Pembentukan Bank sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan	Masih rendahnya masyarakat yang peduli lingkungan	Melaksanakan lomba Bogorku Bersih
		PROGRAM 2.11.04 : PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman	100	100.00	100.00	Mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara	Keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau	Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau	Melaksanakan penanaman pohon di kawasan konservasi

			hayati yang dikonservasi							
	Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Persampahan		Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	105.65	102.04	104.36	Tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah	Rendahnya volume timbunan sampah yang diolah	Sarana dan prasarana persampahan yang rusak	Pengolahan sampah di TPA
			Persentase Reduksi Sampah	114.7	111.57	110.14	Pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan sistem 3R	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah	Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	memperbanyak fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan tekonoloi 3R
		PROGRAM 1.03.04 : PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3 R/TPS yang dibangun	100	100.00	100.00	Mengurangi volume sampah ke TPA	Terbatasnya lahan untuk Pembangunan TPS	Terjadinya penumpukan sampah	Melaksanakan Pembangunan TPS
			Persentase TPA/TPST/SPA/TPS - 3R yang direhabilitasi	100	100.00	100.00	Mengurangi volume sampah ke TPA	Terbatasnya lahan untuk Pembangunan TPS	Adanya TPS yang sudah mengalami kerusakan	Melaksanakan optimasilasi TPS

			Persentase TPA/TPST/SPA/TPS - 3R yang ditingkatkan	100	100.00	100.00	Mengurangi volume sampah ke TPA	Metoda pengelolaan sampah di TPA Galuga masih semi control landfill	Beban pencemaran sampah di sekitar TPA	Melaksanakan optimasiasi TPA Galuga
			Persentase Sarana Persampahan yang terpenuhi	100	100.00	100.00	Armada persampahan yang dimiliki DLH	Banyak armada persampahan yg sudah berumur	Diperlukan peremajaan armada pengangkutan sampah	Peremajaan armada pengangkut sampah
		PROGRAM 2.11.11 : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)	114.7	111.57	110.14	Pengelolaan sampah skala rumah tangga	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah	Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	Sosialisasi/Edukasi pengelolaan sampah
			Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	105.65	102.04	104.36	Tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah	Rendahnya volume timbulan sampah yang diolah	Sarana dan prasarana persampahan yang rusak	Pengolahan sampah di TPA
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	100	100.00	151.13	Sudah dibuat jalur penyapuan	Disiplin kerja para penyapu jalan	masih ada area wilayah yang belum terlewati jalur penyapuan	Pengawasan dan monitoring kepada penyapu jalan

			Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	100	138.10	140.95	kesadaran masyarakat untuk membayar sampah	Masih ada wilayah yang belum ditarik retribusi sampahnya	Rendahnya Kesadaran Partisipasi Masyarakat dan	adanya penambahan wilayah pelayanan
Tujuan 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (nilai)	A	A	A	Tingginya nilai AKIP	Kurangnya pemahaman SDM akan peraturan penilaian Indeks RB	Kurangnya koordinasi antar bidang	Koordinasi antar bidang dalam satu dinas
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A	A	Telah dilaksanakan koordinasi antar bidang	Belum terlaksananya pelaporan monitoring dan evaluasi kegiatan	Dokumen perencanaan dan Pelaporan belum tersusun dengan baik	Koordinasi antar bidang dalam satu dinas
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	101.493	102.941	103.143	Telah disusun SKM DLH	Masih ada yang tidak mau mengisi SKM	Pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan SKM secara

			Lingkup Perangkat daerah							rutin setiap tahun
Tujuan 3 : Terwujudnya Kemudahan akses Layanan SDA dan LH	Sasaran 4 : Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup untuk kepentingan pengendalian Pembangunan		Tujuan : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100.00	100.00	Terbangunnya Sistem Informasi Lingkungan hidup	Web yang susah di akses	Masing kurangnya Ketersediaan data dan informasi Lingkungan hidup	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan
			Sasaran : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100.00	100.00	Terbangunnya Sistem Informasi Lingkungan hidup	Web yang susah di akses	Masing kurangnya Ketersediaan data dan informasi Lingkungan hidup	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan
		PROGRAM 2.11.02 : PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	100.00	100.00	Telah disusun Dokumen RPPLH dan KLHS	Sulitnya mencari data	Diperlukan kajian untuk strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Melaksanakan FGD terkait pengelolaan lingkungan

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup 2025

Capaian paling rendah adalah Indikator Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA hal ini disebabkan oleh :

1. kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah masih belum optimal sehingga menambah volume sampah yang harus diangkut.
2. Kondisi sarana dan prasarana persampahan (Armada persampahan banyak yang sudah berumur).
3. Kurangnya fasilitas seperti tempat pemilahan sampah, tempat sampah sementara (TPS 3R dan Bank Sampah).
4. Masih kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya penambahan aktivitas

pada sub kegiatan yang mendukung atas capaian kegiatan dan program.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mencakup berbagai lapisan masyarakat, baik individu, institusi, maupun komunitas. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan. Sasaran layanan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat langsung, tetapi juga lintas sektor yang berperan dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup mencakup masyarakat umum, Usaha dan/atau kegiatan, sekolah dan komunitas peduli lingkungan dimana jenis pelayanannya adalah terkait : Izin Lingkungan ke pengawasan secara rutin kepada usaha dan atau kegiatan, menindaklanjuti pengaduan terkait pencemaran lingkungan dari masyarakat dan pengelolaan sampah, Secara lebih rinci, kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25.

Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Kelompok Sasaran	Kegiatan Layanan
1	Masyarakat Kota Bogor	Pelayanan Persampahan, informasi kualitas air dan udara
2	Usaha dan/atau kegiatan	• Persetujuan lingkungan, • Persetujuan Teknis pemanfaatan air limbah untuk kegiatan yang memiliki Amdal/UKL-UPL, • Retribusi pelayanan persampahan, • Rincian Teknis (Rintek) Limbah B3
3	Sekolah	• Pembinaan Sekolah Adiwiyata, • Sosialisasi Sekolah Adiwiyata

2.1.5.Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Tabel 2.26.

Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

No	Mitra Perangkat Daerah	Kegiatan Layanan
1	Bupati Bogor	Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor
2	Yayasan Bangun Dua Duta	Pengelolaan Sampah
3	Yayasan Udara Anak Bangsa	Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Bogor
4	PT. Plustik Maju Bersama	Pengelolaan Sampah
5	Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor	Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
6	Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara	Pengelolaan TPS 3R Bantar Kemang dan TPS Mekarwangi Kota Bogor

7	Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara	Pengelolaan sampah di Kota Bogor
8	Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor	Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
9	Yayasan Wordlife Fund Indonesia (WWF)	Penguatan Aksi Bersama Pengelolaan Persampahan
10	PT. Syslab	Pengujian dan Analisa kualitas Air sungai dan situ
11	PT. Sky Pacific Indonesia	Pengujian dan Analisa kualitas udara ambien
10	Radar Bogor	Lomba Bogor ku Bersih
12	PT. Multi Sertifikasi Indonesia	Layanan Pendampingan Sertifikasi ISO 9001:2015

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2025

2.1.6.Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam mendukung capaian kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mendapat dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27.

Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

No	Nama BUMD	Dukungan
1	Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor	Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2	Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor	Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3	Perusahaan Daerah Trans Pakuan	Pengendalian kualitas udara dari emisi gas buang kendaraan

--	--	--

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor 2025

2.1.7.Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama Daerah dapat diartikan sebagai kesepakatan antara pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bersama. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dinas dapat dilihat pada Tabel 2.28. .

Tabel 2.28.

Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG	IMPLEMENTASI
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHA K KEDU A					
1	PKS.140	KSDD	Ade Yasin/ Bupati Bogor	Bima Arya/ Wali Kota Bogor	119/37/PKS/K S/XII/2020	658.1/Perj.14 0-DLH/2020	30 Desember 2020	5	30 Desember 2025	Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor	1. Mendapatkan pelayanan pengolahan sampah 2. Melakukan Pembuangan Sampah sebanyak 130 kendaraan dengan rata-rata perhari 550 ton/hari 3. Melakukan Pembayaran KDN setiap tahun 4. Melakukan pengobatan cuma-cuma ke tiga desa yg terdampak adanya TPAS Galuga, Pengendalian Hama dan Fumigasi,pembuatan MCK, perbaikan sarana dan prasarana.
2	PKS.49	KSDPK	Bima Arya/ Wali Kota Bogor	Alexander S. Rusli/ Ketua Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia	119/Perj.49-DL H/2021	051/WWF-ID/ IGL-PJJ/VIII/ FY22/2021	26 Agustus 2021	3	26 Agustus 2024	Aksi Bersama untuk Kota Bogor sebagai Bagian Plastic Smart Cities	1. pembangunan fasilitas pengelolaan sampah residu di Kel. Mekarwangi 2. pelaksanaan edukasi dan bimtek pengelolaan sampah 3. rehabilitasi fasilitas TPS 3R Bantarkemang 4. pelaksanaan study

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG	IMPLEMENTASI
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					
											banding pengelolaan sampah lintas wilayah dan OPD
3	PKS.132	SINERGI	Denni Wismanto/ Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Rino Indra Gusniawan /Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor	119/Perj.132-D LH/2022	690/PKS.136- PERUMDA.TP KB/2022	29 Desember 2022	3	2 Januari 2025	Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	a. Terlayannya angkutan persampahan kepada wajib retribusi pelanggan Pihak Kedua b. Terpenuhinya dana penunjang kegiatan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada Pihak Kedua
4	KB.23	KSDPK	Bima Arya/ Wali Kota Bogor	Eddy M. Nurmeinsyah/Di rektur Yayasan Bangun Dua Duta	119/.KB.23-DL H/2023	001/01-BDD	15 Mei 2023	3	15 Mei 2026	Pengelolaan Sampah	1. Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang lebih teknis dan operasional antara PT Yayasan Bangun Dua Duta dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor 2. PKS sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini adalah PKS terkait Bank Sampah Induk (BSI) Kota Bogor.

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGAN AN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG	IMPLEMENTASI
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					
5	KB.60	KSDPK	Bima Arya/ Wali Kota Bogor	Co-Founder Yayasan Udara Anak Bangsa	119/KB.60-DL H/2023	01/YUAB/PR E/X/2023	20 Oktober 2023	3	20 Oktober 2026	Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Bogor	Implementasi penyusunan Draft SK Pokja dan Inventarisir data
6	KB.62	KSDPK	Bima Arya/ Wali Kota Bogor	Teuku Reza Hasnifanda/Direktur PT Pustik Maju Bersama	119/KB.62-DL H/2023	028/PUSTIK/ X/2023	30 Oktober 2023	5	30 Oktober 2028	Pengelolaan Sampah	1. Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang lebih teknis dan operasional antara PT Plustik Maju Bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor 2. Penyusunan PKS sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini adalah PKS terkait Pengelolaan Sampah di tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga.
7	PKS.38	KSDPK	Denni Wismanto/ Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Eddy M. Nurmeinsyah /Direktur Yayasan Bangun Dua Duta	119/Perj.38-DL H/2023	001/02-BDD	15 Mei 2023	3 tahun	15 Mei 2026	Bank Sampah Induk (BSI) Kota Bogor	Sudah Melakukan Kegiatan serta memberikan laporan timbulan sampah an. organik dari wilayah Kota Bogor yang telah terbentuk BSU (Bank Sampah Unit). Meliputi jumlah tonase sampah, detail sampah dan tanggal penjemputan oleh BSI ke

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGAN AN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG	IMPLEMENTASI
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					
											BSU.
8	PKS.112	KSDPK	Denni Wismanto/ Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Teuku Reza Hasnifanda/ Direktur PT Plustik Maju Bersama	119/Perj.112-D LH/2023	029/PLUSTIK /X/2023	30 Oktober 2023	2	30 Oktober 2025	PENGOLAHAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) GALUGA	Pihak Pemerintah Daerah Kota Bogor sudah menyediakan lahan,pihak PT. Plustik Maju Bersama sudah membangun tempat pengolahan sampah dan sudah melaksanakan administrasi penyewaan lahan. di Bulan Mei 2024 Pihak Plustik mengalami kerusakan akibat angin puting beliung, sehingga kegiatan pengolahan sampah terhenti.
9	KB.06	KSDPK	Bima Arya/ Wali Kota Bogor	Ken Irawan Putra /Direktur Program untuk Urban dan Keberlanjutan Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara	500.12.17.1/K B.6-DLH/2024	107/SPK/YRJ AN/III/2024	1 Maret 2024	5	1 Maret 2029	Pengelolaan Sampah di Kota Bogor	1. Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola sampah 2. Terlaksana edukasi dan sosialisasi pemilahan dan pengolahan sampah mulai dari sumber 3. Terjadinya sirkular ekonomi dalam pengelolaan sampah.

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG	IMPLEMENTASI
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					
10	PKS.24	KSDD	Asep Kuswanto /Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Denni Wismanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor)	3266/LH.02.00	500.12.17.1/Perj.24-DLH/2024	22 Maret 2024	5	22 Maret 2029	Pengendalian Pencemaran Udara di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kota Bogor	Belum ada implementasi.
11	PKS.91	KSDD	Bey Triadi Machmudin / Pj. Gubernur Jawa Barat	Hery Antasari / Pj. Walikota Bogor	89/PBLS.04/DLH	500.12.17.1/Perj.91-DLH/2024	24 September 2024			Pelayanan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) regional untuk wilayah kabupaten bogor, kota bogor, kota depok, dan kota tanggerang	1. Mendapatkan pelayanan pengolahan sampah 2. Melakukan Pembuangan Sampah sebanyak 10 ton/hari mulai dari bulan agustus 2024 s.d sekarang 3. Melakukan Pembayaran KJP (Kompensasi Jasa Pelayanan) di bulan Agustus s.d September (Oktober s.d November masih diproses) 4. Melaksanakan Rekon terkait Pelayanan Persampahan (Jumlah Tonase dan Ritasi) setiap akhir bulan

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG	IMPLEMENTASI
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					
12	PKS.98	KSDPK	Denni Wismanto/ Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	JENAL ABIDIN /Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor	500.12.17.1/Perj.98-DLH/2024	660.2/PKS.190-PPJ/2024	11 November 2024	3	11 November 2027	PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	1. Terlayannya angkutan persampahan kepada pasar-pasar yang dikelola oleh PIHAK KEDUA 2. Terlaksananya pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada Pihak Kedua di bulan November 2024 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan PARA PIHAK

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor, 2025

2.1.8. Inovasi Perangkat Daerah

Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah melakukan inovasi yang digunakan dalam internal Dinas Lingkungan Hidup. Secara lengkap daftar inovasi Dinas Lingkungan Hidup dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.29.

Inovasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

No.	Inovasi Eksisting			Rencana		
	Nama Inovasi	Tahun	Gambaran Singkat	Nama Inovasi	Tahun	Gambaran Singkat
1	SI BOTAK (Bogor Tanpa Kantong Plastik)	2018	Program Pemerintah Kota Bogor untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di toko modern dan pusat perbelanjaan sejak 1 Desember 2018, sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 61 Tahun 2018. Program ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik dan mencapai target zero kantong plastik pada tahun 2025, yang selanjutnya diperluas ke pasar tradisional.			
2	SIMPELA (Sistem Informasi Pelaporan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3)	2023	Memudahkan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan			

No.	Inovasi Eksisting			Rencana		
	Nama Inovasi	Tahun	Gambaran Singkat	Nama Inovasi	Tahun	Gambaran Singkat
			penyimpanan limbah B3			
3	SIKASAI (Sistem Input Bank Sampah berbasis aplikasi)	2024	Pencatatan sampah anorganik (kertas, plastik dan lain-lain yang bernilai ekonomis) di bank sampah induk			
4	SIAPIK (Siap Pilah Ikut Kelola) di RT Bebas Sampah	2025	Berawal dari masalah timbulan sampah yang cukup besar dari sumber rumah tangga yaitu sampah organik yang mencapai 60% dari total sampah rumah tangga,sehingga DLH Kota Bogor merancang untuk mengurangi timbulan sampah dari sumber dengan cari memilah sampah menjadi 3 bagian, yaitu organik, an organik dan residu serta dikelola yang baik dan bernilai ekonomis. Usaha mengelola sampah rumah tangga ini menjadi inspirasi inovasi dengan nama SIAPIK RT Bebas Sampah.			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2025

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dapat diukur dan diidentifikasi dari kondisi yang ada saat ini dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada urusan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian tersebut di Kota Bogor tersaji pada tabel 2.30. di bawah ini.

Tabel 2.30.

Identifikasi Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup

No	Permasalahan RPJMD 2025-2029	Permasalahan KLHS 2025-2029	Permasalahan RTRW	Permasalahan Nasional dalam RPJMN 2025-2029	Permasalahan RPJMD Provinsi 2025-2029	Permasalahan Perangkat Daerah
1	Laju pertumbuhan penduduk relatif rendah tetapi tetap memberikan tekanan lingkungan hidup	Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Kualitas dan Kuantitas Air	Krisis lingkungan	Kualitas Lingkungan Hidup	Masih adanya kegiatan/ usaha yang belum menaati/ mematuhi aspek lingkungan sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.
2	Tekanan kualitas lingkungan hidup dan produksi polusi					Masih kurangnya tingkat ketaatan pelaku usaha/ kegiatan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku
3	Penanganan sampah masih perlu dioptimalkan					Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

No	Permasalahan RPJMD 2025-2029	Permasalahan KLHS 2025-2029	Permasalahan RTRW	Permasalahan Nasional dalam RPJMN 2025-2029	Permasalahan RPJMD Provinsi 2025-2029	Permasalahan Perangkat Daerah
		menyeluruh.				

Sumber : *Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup 2025*

Tabel 2.31.

Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Permasalahan utama	Permasalahan	Akar permasalahan
1	Menurunnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Menurunnya kualitas udara ambien; 2. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian dan peternakan; 3. Meningkatnya emisi gas rumah kaca; 4. Menurunnya kualitas DAS Ciliwung Cisadane; 5. Menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air; 6. Pengelolaan sampah; 7. Belum terpenuhinya ketersediaan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Masih adanya kegiatan/ usaha yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. 9. Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah masih belum optimal sehingga reduksi sampah dari sumbernya masih sangat kecil; 10. Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan belum berjalan secara sinergis sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan efisien.	1. Bertambahnya jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun 2. Adanya alih fungsi lahan 3. Meningkatnya aktifitas kegiatan/dan usaha 4. Belum optimalnya pengelolaan limbah cair kegiatan usaha sesuai dengan ketaatan perizinan 5. Penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik namun pengurangan sampah masih belum optimal 6. Kurangnya kesadaran masyarakat didalam pengelolaan lingkungan hidup 7. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap Upaya pengelolaan lingkungan hidup

Sumber : *Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup 2025*

2.2.2.Penetapan Isu Strategis

Bagian ini berisi identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN

2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, hasil telaahan terhadap RTRW ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui FGD/Konsultasi Publik.

a. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Salah satu yang referensi yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor 2025-2029 ini adalah RPJMN 2025-2029, dengan Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra- putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Untuk Renstra DLH Kota Bogor sesuai dengan Misi Kota Bogor tahun 2025-2029 adalah :

- Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

- Asta Cita 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
- Asta Cita 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
- Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

b. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Salah satu yang referensi yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026 ini adalah Renstra Kementerian LHK 2025-2029.” Visi Kementerian LHK adalah Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045. Dengan Misi dan Tujuan seperti gambar berikut ini.



Sumber : KLHK

c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RENSTRA tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 tahun 2021 Kota Bogor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, digunakan untuk mengkaji dan mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan DLH. Struktur Ruang meliputi susunan pusat-pusat permukiman Kota Bogor sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang meliputi distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Terkait dengan permasalahan lingkungan, dokumen RTRW dilengkapi dengan ketentuan peraturan zonasi yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ramah lingkungan berkelanjutan. Ketentuan peraturan zonasi sepatutnya dipatuhi oleh seluruh pelaku pembangunan dan juga oleh pemerintahan sebagai pengawas pembangunan, termasuk DLH.

d. Hasil Telaahan Substansi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

#Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Pasal 32 ayat (2) huruf c dan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan KLHS. KLHS disusun untuk mengevaluasi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pembangunan sehingga dipastikan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Melalui KLHS, Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam pembangunan di Jawa Barat. Seluruh kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan

dampak dan/atau resiko lingkungan hidup telah dikaji secara mendalam.

Terdapat enam muatan utama KLHS yaitu: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Peran KLHS dalam penerapan kebijakan makro :

1. Memperkuat aspek lingkungan hidup (environmental safeguard) terkait dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
2. Instrumen pembangunan berkelanjutan agar bisa dilaksanakan kedalam dokumen perencanaan daerah;
3. Memperkuat aspek pembangunan di jawa barat dengan mempertimbangan 6 muatan lingkungan hidup.

Gambar 2.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : KLHK

Berdasarkan proses yang telah dilakukan, disepakati bahwa Kota Bogor memiliki Sembilan isu strategis pembangunan berkelanjutan, yakni :

1. TPB 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. TPB 2 : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
3. TPB 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. TPB 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. TPB 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
6. TPB 8 : Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
7. TPB 10 : Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
8. TPB 11 : Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
9. TPB 13 : Penanggulangan Perubahan Iklim

Dari hasil identifikasi TPB yang menjadi isu strategis kemudian dilakukan pengelompokkan berdasarkan kesamaan isu. Hasil pengelompokkan ini kemudian dirumuskan sebagai isu strategis yang ditetapkan dalam KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil pengelompokkan isu, terdapat 6 (enam) isu strategis yang ditetapkan dalam KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang Sejahtera.
2. Peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing
3. Peningkatan akses terhadap infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
4. Peningkatan dan pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi

5. Peningkatan terhadap upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
6. Peningkatan kinerja dan kolaborasi kelembagaan pemerintah dan non pemerintah di Kota Bogor

Identifikasi dan perumusan isu strategis berdasarkan hasil telaahan 6 (enam) muatan KLHS yaitu :

1. Penurunan daya dukung pangan
2. Penyediaan sumberdaya air
3. Pencemaran/ timbunan beban pencemar terhadap sungai/ badan air penerima
4. Pengelolaan sampah yang belum optimal
5. Kondisi rawan banjir dan longsor
6. Peningkatan Kebutuhan Ruang
7. Ketersediaan ruang terbuka hijau

Hasil dari *Focus Group Discussion* (FGD)

Perhatian publik terhadap isu lingkungan hidup di Kota Bogor mencerminkan kerumitan tantangan yang dihadapi wilayah ini. Berbagai masalah, seperti penggunaan lahan, kualitas air, kualitas udara, risiko bencana, urbanisasi, dan tata kelola, menjadi fokus utama bagi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, maka dilaksanakan FGD Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Penyaringan Isu Prioritas melibatkan Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kota Bogor, Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan dan Unsur Akademisi yang dikukuhkan oleh Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 600.4.3.2/Kep.99-DLH/2025

Hasil Analisa Penyaringan Isu Prioritas yaitu :

1. Pengelolaan Sampah Perkotaan
2. Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
3. Kualitas dan Kuantitas Air Bersih
4. Kualitas Udara

Berdasarkan identifikasi masalah, telaahan dan konsultasi publik yang dilakukan DLH beberapa hal yang perlu ditangani selama

5 (lima) tahun ke depan adalah isu-isu lingkungan yang merupakan dampak aktivitas kota antara lain :

Tabel 2.32.
 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Ruang Lingkup Pelayanan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya pemantauan kualitas lingkungan	Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Perubahan iklim, cuaca ekstrem, hilangnya Kehati, dan persaingan atas sumber daya alam	Tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan yang semakin tinggi di perkotaan, ditambah dengan rendahnya ketangguhan perkotaan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim	• Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi lindung guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan • Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana • Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo Tempat Pengolahan dan	• Menurunnya Kualitas dan kuantitas air • Menurunnya Kualitas udara
Pengelolaan Persampahan	Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota			Membangun energi terbarukan melalui pembangunan PSEL		Penanganan persampahan

Ruang Lingkup Pelayanan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo merupakan proyek pengelolaan sampah perkotaan dengan pengembangan energi terbarukan, khususnya daur ulang sampah menjadi energi	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2029 secara khusus disajikan pada bagian ini. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Kinerja tujuan dan sasaran dapat diukur dan selanjutnya dievaluasi dengan indikator yang ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact), namun secara khusus indikator yang pada bagian ini merupakan alat ukur pencapaian kinerja hasil (outcome), dampak (impact). Penentuan indikator berfungsi untuk memberikan batasan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Perumusan tujuan, sasaran, dan indikator merupakan tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Bogor tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor. Pernyataan visi Kota Bogor periode 2025-2029 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang Visi Kota Bogor tahun 2025-2029 adalah :

“BOGOR BERES – BOGOR MAJU”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Berakar dari keinginan kuat untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang tertata dan berdaya saing tinggi di berbagai aspek

kehidupan. Fokus pada perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kota Bogor dapat tumbuh menjadi kota maju yang berkelanjutan.

- **Bogor Beres** artinya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun Kota Bogor sampai beres. Beres tidak hanya bermakna menata secara fisik, tetapi menata kualitas secara keseluruhan, termasuk beres pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga kota. Beres juga mengandung makna bahwa untuk bergerak kedepan, permasalahan (lama) yang masih ada perlu diselesaikan (dibereskan) segera. Tidak mungkin kota bergerak maju kedepan jika permasalahan dasar masih belum terurai.

- **Bogor Maju** artinya membangun kemajuan Kota Bogor. Kemajuan sering kali ditandai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi (atau inovasi). Hal ini juga menjadi salah satu pilar dari kemajuan Kota Bogor. Namun, kemajuan ini perlu juga disokong dengan pilar-pilar lainnya, termasuk kota yang memiliki kebudayaan dan karakter masyarakat yang kuat, manusia yang berkualitas, serta infrastruktur yang memadai.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Misi pertama **BOGOR CERDAS**, mencerminkan perwujudan kualitas intelektualitas manusia, tata kelola pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, misi ini memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memperdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal. Selain itu, misi ini juga memastikan

pengelolaan pembangunan yang baik, disertai dengan aparatur yang cerdas dan pelayanan publik yang semakin prima dan inovatif.

2. Misi kedua **BOGOR SEHAT**, mencerminkan perwujudan kualitas warga dan lingkungan yang sehat. Dengan demikian, misi ini memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selain itu, misi ini juga memastikan penciptaan kualitas lingkungan binaan dan hidup yang menopang kesehatan dan kualitas hidup warganya dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
3. Misi ketiga **BOGOR SEJAHTERA**, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas ekonomi kota yang berkeadilan. Dengan demikian, misi ini memastikan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif yang inovatif, dan peningkatan pendapatan daerah.
4. Misi keempat **BOGOR LANCAR**, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas mobilitas dan tata ruang. Dengan demikian, misi ini berupaya untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan transportasi publik, memperluas aksesibilitas dan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik.

Berdasarkan pada misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut misi yang terkait dengan urusan lingkungan hidup adalah misi ke 2 (dua) yaitu **BOGOR SEHAT**.

Berpedoman pada visi dan misi RPJMD maka dirumuskan Tujuan Pembangunan Renstra Dinas Lingkungan Kota Bogor 2025-2029 sebagai berikut :

- Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah:
 1. Terkendalinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
 2. Meningkatnya Reduksi Sampah
 3. Meningkatnya Kualitas Penanganan Sampah

4. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 9 (Sembilan) program yaitu : (1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, (3) Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3), (4) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH, (5) Program Peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, (6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, (7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, (8) Program Pengelolaan Persampahan dan (9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sasaran RPJMD 1 : Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan			IK Sasaran RPJMD 1 : Indeks Kualitas Air	Poin	50.89	71.30	71.50	71.70	71.90	72.10	72.30	
				IK Sasaran RPJMD 2 : Indeks Kualitas Udara	Poin	86.51	55.63	56.03	56.43	56.83	57.23	57.63	
				IK Sasaran RPJMD 3 : Indeks Kualitas Lahan	Poin	23.59	38.81	38.88	38.95	39.02	39.09	39.15	
		Tujuan Renstra : Terwujudnya Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup		IK Tujuan 1 : Indeks Kualitas Air	Poin	50.89	71.30	71.50	71.70	71.90	72.10	72.30	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				IK Tujuan 2 : Indeks Kualitas Udara	Poin	86.51	55.63	56.03	56.43	56.83	57.23	57.63	
				IK Tujuan 3 : Indeks Kualitas Lahan	Poin	23.59	38.81	38.88	38.95	39.02	39.09	39.15	
			Sasaran Renstra 1 : Terkendalnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	IK Sasaran : Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	Persentase	NA	79.16	79.16	79.16	79.16	79.16	79.16	
				IK Sasaran : Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Persentase	NA	88.88	88.88	88.88	88.88	88.88	88.88	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				IK Sasaran : Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	Ha	0.5	0.5	1	1.5	2	2.5	3	
	Sasaran RPJMD 2: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca			IK Sasaran RPJMD: Penurunan emisi GRK Kumulatif (Ton CO2Eq)	Persentase	50.89	21.79 8,45	35.1 47,0 5	53.79 4,32	82.18 0,71	130. 547, 42	191. 425, 41	
		Tujuan Renstra : Terwujudnya Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup		IK Tujuan 4 : Persentase sampah terkelola	Persentase	93,73	93,93	94,1 3	94.33	94.53	94.7 3	95.0 3	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sasaran Renstra 2 : Meningkatnya Reduksi Sampah di Sumber	IK Sasaran : Persentase timbulan sampah terdaur ulang	Persentase	22.26	22.46	22.68	22.86	23.08	23.36	23.56	
			Sasaran Renstra 3 : Meningkatnya Kualitas Penanganan Sampah	IK Sasaran : Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase	68.19	71.21	72.81	73.41	74.51	75.11	76,71	
				IK Sasaran : Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persentase	23.99	24.29	24.59	24.89	25.19	25.49	25.79	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sasaran RPJMD: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			IK Sasaran RPJMD: Indeks Pelayanan Publik		4,65	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69	4,70	
		Tujuan Renstra : Terwujudnya Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup		IK Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	86.43	86.45	86.5	86.52	86.55	86.58	86.6	
			Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan	Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	A (89.50)	A (89.55)	A (89.60)	A (89.65)	A (89.70)	A (89.75)	A (89.80)	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Keuangan di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor										
				Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Persentase	3.61	3.61	3.62	3.63	3.64	3.65	3.66	
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita	Persentase	95	96	96.05	96.10	96.15	96.20	96.25	
				Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi/Tahun	1	1	1	1	1	1	1	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi. Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi Renstra PD
Misi 2 : Bogor Sehat				
Tujuan : terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan (<i>Smart Environment</i>)				
1	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Peningkatan Reduksi Sampah di sumber	Peningkatan peran serta masyarakat	Pembentukan Bank sampah unit, pembangunan TPS 3R
		Peningkatan Kualitas Pengolahan Sampah	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar	Penyediaan fasilitas dan armada angkutan sampah yang layak dan memadai dengan penambahan/peremajaan unit truk sampah, peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga dengan pendekatan sanitary landfill, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di TPPASR Lulut Nambo sesuai dengan kesepakatan kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat, pengembangan teknologi pengolahan sampah modern seperti RDF (Refuse-Derived Fuel) , pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) untuk mengurangi ketergantungan pada lahan pembuangan sampah.
		Peningkatan partisipasi masyarakat dan	Penerapan dan Pengelolaan 3R dan Bank Sampah berbasis	Menguatkan Kapasitas dan Kelembagaan Masyarakat dalam pengelolaan persampahan

		komunitas dalam 3R	pemberdayaan masyarakat	
		Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim	Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) di Wilayah RW/Kelurahan
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Terkendalnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Mengendalikan Kegiatan/Usaha Manusia yang Berpotensi sebagai Sumber-Sumber Pencemar Air
			Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air	Mengendalikan Kegiatan/Usaha Manusia yang Berpotensi sebagai Sumber-Sumber Pencemar Udara
				Meningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
				Peningkatan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air, udara dan tanah
		Meningkatkan konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik kawasan lindung	Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang	Penanaman pohon di kawasan konservasi

3.2. PENTAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Strategi Rensta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Pentahapan Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kelembagaan	Penguatan partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat	Pengembangan Infrastruktur Lingkungan	Pengelolaan lingkungan	Evaluasi dan Pengawasan
Menguatkan kelembagaan lingkungan hidup, termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.	Menguatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui Sosialisasi, edukasi dan pelatihan lingkungan hidup	Penyediaan fasilitas dan armada angkutan sampah yang layak, peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga dengan pendekatan sanitary landfill,	Pengembangan teknologi pengolahan sampah modern seperti RDF (Refuse-Derived Fuel) serta , pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) untuk mengurangi ketergantungan pada lahan pembuangan sampah	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi lingkungan hidup.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 PENJENJANGAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Penjenjangan Kinerja dalam Peraturan ini terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu :

1. menentukan Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja;
2. menentukan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*);
3. menguraikan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
4. merumuskan Indikator Kinerja; dan
5. menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan.

Penjenjangan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1.
Penjejangan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Sasaran RPJMD 1 : Meningkatnya kualitas udara, air dan lahan					IK Sasaran RPJMD 1 : Indeks Kualitas Air	Poin		
					IK Sasaran RPJMD 2 : Indeks Kualitas Udara	Poin		
					IK Sasaran RPJMD 3 : Indeks Kualitas Lahan	Poin		
	Tujuan Renstra 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas Lingkungan Hidup				IK Tujuan 1 : Indeks Kualitas Air	Poin		
					IK Tujuan 2 : Indeks Kualitas Udara	Poin		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					IK Tujuan 3 : Indeks Kualitas Lahan	Poin		
		Sasaran Renstra 1 : Terkendalinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup			IK Sasaran 1 : Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	Persentase		
					IK Sasaran 2 : Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Persentase		
					IK Sasaran 3 : Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	Ha		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan dan		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	Persentase	Program 1 : Perencanaan Lingkungan Hidup	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Kabupaten/Kota yang Disusun	Kabupaten/Kota yang disusun		Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
			Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup		Persentase jumlah Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Persentase	Program 2 : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
					Persentase jumlah Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Persentase		
					Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	Ha		
				Meningkatnya Pemenuhan Baku	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Air, Sungai dan Situ	Titik	Kegiatan 1 : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Mutu Lingkungan Hidup			Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	Titik		
					Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	Lokasi		
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
				Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK	Dokumen	Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
				Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
				Melaksanakan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	Dokumen	Sub Kegiatan 4 : Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	
				Meningkatnya Pemulihan	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	Laporan	Kegiatan 2 : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan			Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Melaksanakan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	
			Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup		Persentase Limbah B3 yang terkelola	Persentase	Program 3 : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
				Meningkatnya Jumlah Kegiatan/Usaha penghasil Limbah B3 yang dibina	Jumlah Rincian Teknis B3 yang dikeluarkan	Persentase	Kegiatan 1 : Penyimpanan Sementara Limbah B3	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Meningkatnya ketaatan Pelaku Kegiatan/Usaha terhadap Dokumen Perizinan	Jumlah laporan dari usaha dan atau kegiatan yang diawaasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Laporan	Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Melaksanakan fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
				Melaksanakan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	Sub Kegiatan 2 : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Pemahaman Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Kegiatan /Usaha Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup		Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	Program 5 : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
				Terlaksananya Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan dan	Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Pelaku Kegiatan/ Usaha	Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Perlindungan Lingkungan hidup terhadap masyarakat			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	Lembaga		
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	Sub Kegiatan 1 : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	Sub Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				untuk Lembaga Kemasyarakatan				
				Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lemb/Komunitas/ Kelomp Masy	Sub Kegiatan 3 : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga yang melakukan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup		Persentase partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	Program 6 : Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Jumlah RT/Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	Kegiatan 1 : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Melaksanakan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	Sub Kegiatan 1 : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	Persentase	Program 7 : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/dikelola	Persentase	Kegiatan 1 : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Melaksanakan pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengaduan	Sub Kegiatan 1 : Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
Sasaran RPJMD 2: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca					IK Sasaran RPJMD: Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persentase		
	Tujuan Renstra 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas				IK Tujuan 4 : Presentase sampah terkelola	Persentase		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
	Lingkungan Hidup							
		Sasaran 2 : Meningkatnya Reduksi Sampah di Sumber			IK Sasaran 2 : Persentase timbulan sampah terdaur ulang	Persentase		
			Terbangunnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan		Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	Persentase	Program 8 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				Terkelolanya sampah di Kota Bogor	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Persentase	Kegiatan 1 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	
				Melaksanakan Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Ton/ Hari	Sub Kegiatan 1 : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Melaksanakan Peningkatan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	Ton/ Hari	Sub Kegiatan 2 : Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
				Melaksanakan Optimalisasi TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	Unit	Sub Kegiatan 3 : Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
				Melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	Unit	Sub Kegiatan 4 : Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	
		Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Penanganan Sampah			IK Sasaran 3 : Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
				Meningkatkan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	Sub Kegiatan 2 : Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
				Meningkatkan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	Sub Kegiatan 3 : Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Sasaran RPJMD 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					IK Sasaran RPJMD: Indeks Pelayanan Publik			
	Tujuan Renstra 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas Lingkungan Hidup				IK Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks		
		Sasaran 4 : Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor			Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Persentase		
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Persentase		
					Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi		
			Meningkatnya pelaksanaan penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pelaporan dan administrasi		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Program 10 : Penunjang Pemerintahan Kabupaten/ Kota Urusan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor					
					Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persentase		
					Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai		
					Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan setiap tahun	Inovasi		
				Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	Persentase	Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Persentase Realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	Persentase		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Sub Kegiatan 1 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Sub Kegiatan 2 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	Persentase	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	Persentase		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persentase	Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Sub Kegiatan 3 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersediaanya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Sub Kegiatan 4 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Sub Kegiatan 5 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya sarana prasarana BMD sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Persentase	Kegiatan 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Sub Kegiatan 1 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang operasional perangkat daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	Kegiatan 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya pemenuhan kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya pemenuhan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya pemeliharaan BMD Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	Persentase	Kegiatan 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Sub Kegiatan 2 : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/ Direhabilitasi		Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Data olahan Dinas Lingkungan Hidup 2025

4.2 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Seperti telah dijelaskan dalam bagian mengenai strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan, maka Program yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Bogor. Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kota Bogor, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang.

Selain itu penentuan program dan kegiatan juga didasarkan pada tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 10 (sepuluh) sub urusan lingkungan hidup, diantaranya; Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan. Ditambah sub urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 (satu) Program yaitu Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Pertimbangan lain dalam penyusunan program dan kegiatan adalah tercapainya indikator-indikator yang telah dikembangkan dalam penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup untuk level organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan Renstra ini .

Mempertimbangkan hal-hal di atas, serta mengacu kepada strategi dan arah kebijakan yang dijelaskan dalam Strategi dan Arah Kebijakan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 ditetapkan 10 (sepuluh) Program dengan rincian sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Seluruh kegiatan yang dikembangkan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Indikasi Progam Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 – 2029 berdasarkan ke sepuluh rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket (ASTA CITA/Konsultasi Publik/RAD)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Urusan Lingkungan Hidup														
Program 1 : Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	Persentase	100	40.00	420,000,000	60.00	400,000,000	-	-	80	350,000,000	100	350,000,000	
Kegiatan 1 : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Dokumen	1	1	420,000,000	1	400,000,000	-	-	1	350,000,000	0	-	Konsultasi Publik, Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup
Sub Kegiatan 1 : Peninjauan kembali terhadap RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPL Kabupaten/Kota yang	Dokumen	0	1	420,000,000	1	400,000,000	-	-	1	350,000,000	0	-	Konsultasi Publik, Kajian Rencana Perlindungan dan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket (ASTA CITA/Konsultasi Publik/RAD)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
- Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2030-2034 - Peninjauan RPPLH														
Program 2 : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Persentase	70	70.09	1,439,999,616	70.12	600,000,000	70.21	650,000,000	70.4	600,000,000	70.49	600,000,000	
	Persentase jumlah Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Persentase	75	76.67		77.78		78.89		80		81.11		
	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	Ha	0.01	0,02		0,03		0,04		0.05		0.06		

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket (ASTA CITA/Konsultasi Publik/RAD)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
- Belanja Tempat Sampah Beroda untuk limbah B3														
Program 4 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase	58	58.45	303,000,000	58.58	300,000,000	59.71	300,000,000	60.84	300,000,000	61.04	300,000,000	
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Laporan	32	38	303,000,000	40	350,000,000	42	350,000,000	45	350,000,000	42	350,000,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket (ASTA CITA/Konsultasi Publik/RAD)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program 6 : Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	22.18	22.22	550,000,000	22.24	600,000,000	22.26	600,000,000	22.30	700,000,000	22.32	750,000,000	Lomba Bogorku Bersih
Kegiatan 1 : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT/Masyarakat/ Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	680	784	550,000,000	784	600,000,000	784	600,000,000	784	700,000,000	784	750,000,000	Lomba Bogorku Bersih
Sub Kegiatan 1 : Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	5	5	550,000,000	5	600,000,000	5	600,000,000	5	700,000,000	5	750,000,000	Lomba Bogorku Bersih

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket (ASTA CITA/Konsultasi Publik/RAD)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aktifitas														
- Penyelenggaraan Acara Bogorku Bersih - Pembinaan Adiwiyata														
Program 7 : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	Persentase	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	159,878,300	
Kegiatan 1 : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan	Persentase	100	58.33	50,000,000	75.00	50,000,000	83.33	50,000,000	91.67	50,000,000	100.00	179,878,800	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket (ASTA CITA/Konsultasi Publik/RAD)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/dikelola													
Sub Kegiatan 1 : Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengaduan	5	7	50,000,000	9	50,000,000	10	50,000,000	11	50,000,000	12	159,878,205	
Aktifitas														
Pengujian dan Analisa Kualitas Air Limbah bagi kegiatan usaha yang diadakan oleh masyarakat														
Program 8 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	Persentase	58.33	66.67	9,226,606,538	75	13,380,000,000	75.26	10,930,000,000	83.25	11,980,000,000	83.33	13,000,000,000	
Kegiatan 1 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Persentase	96	98.62	9,226,606,538	99	13,380,000,000	99.38	10,930,000,000	99.69	11,980,000,000	100	13,000,000,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket (ASTA CITA/Konsultasi Publik/RAD)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
- Mini Sweaper - Electrical Hand Push Sweaper														
Sub Kegiatan 1 : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Ton/Hari	534	547.18	-	547.98	300,00 0,000	548.18	300,00 0,000	548.38	300,000 ,000	548.58	300,000,0 00	Pokir
Aktifitas														
Pekerjaan Pembangunan TPS dan TPS 3R														
Program 9 : Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	Persentase	66.95	67.13	18,204,371,100	67.23	13,220,000,000	67.33	13,950,000,000	67.43	14,750,000,000	67.53	15,650,000,000	
Kegiatan 1 : Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	Persentase	55	57	18,204,371,100	58	13,220,000,000	59	13,950,000,000	60	14,750,000,000	60.02	15,650,000,000	ASTA CITA
	Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	Persentase	90	92		93		94		95		95		

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket (ASTA CITA/Konsultasi Publik/RAD)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
- Jasa Penunjang Retribusi Kebersihan (PDAM) - Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan (Karung Plastik) - Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan TPS 3R - Jasa Uji Kualitas Laboratorium - Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Gedung TPS 3R - Pemeliharaan Bangunan Gedung TPS 3R - Jasa Konsultansi Pengawasan Bangunan Gedung TPS 3R														
Program 10 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	89.50	89.60	108,982,581,239	89.65	108,947,420,000	89,70	111,414,420,000	89,75	113,923,845,000	89.80	125,418,000,007	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persentase	95	96.05		96.10		96.15		96.20		96.25		
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	89.03	90.15		90.25		90.35		90.40		90.50		
	Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan setiap tahun	Inovasi/Tahun	1	1		1		1		1		1		

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket (ASTA CITA/Konsultasi Publik/RAD)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan 2 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	NA	3	-	3	125,00 0,000	3	125,00 0,000	3	125,000 ,000	3	125,000,0 00	
Aktifitas														
1. Penyusunan LKIP DLH 2. Penyusunan LKPJ DLH 3. Penyusunan Laporan Monev RKPD Triwulan 1,2,3, 4 dan Tahunan														
Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	Persentase	93.79	94.20	31,885,4 00,373	94.40	34,859, 920,00 0	94.60	35,434, 920,00 0	94.75	36,367, 420,000	94.75	38,410,00 0,000	
	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	Persentas	100	100		100				100		100		
Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	252	238	31,775,4 80,373	225	34,750, 000,00 0	205	35,325, 000,00 0	196	36,257, 500,000	196	38,300,00 0,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket (ASTA CITA/Konsultasi Publik/RAD)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aktifitas														
Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di lingkup DLH														
Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1	109,920,000	1	109,920,000	1	109,920,000	1	109,920,000	1	110,000,000	
Aktifitas														
Penyusunan dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD akhir tahun														
Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persentase	100	100	1,315,845,700	100	1,365,000,000	100	1,460,250,000	100	1,540,750,000	100	1,580,000,000	
Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	448,539,300	1	495,000,000	1	544,500,000	1	598,950,000	1	600,000,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket (ASTA CITA/Konsultasi Publik/RAD)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan														
Sub Kegiatan 4 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	Paket	2	1	113,182,400	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	1	140,000,000	
Aktifitas														
- Belanja Barang Cetakan (Buku Daftar Rincian Pemakaian BBM, Buku Permohonan Alat Kebersihan, Buku Serah Terima Arsip, Buku Permohonan Penggantian Sparepart Kendaraan Dinas, Buku Permohonan Penggantian Oli Kendaraan Dinas, Buku Kendali Surat Masuk dan Surat Keluar) - Belanja Penggadaan - Belanja Penjilidan - Belanja Spanduk														
Sub Kegiatan 5 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	12	304,144,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,600,000	12	260,000,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket (ASTA CITA/Konsultasi Publik/RAD)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
- Belanja Modal Pendingin Ruangan - Belanja Modal Kursi Kerja - Belanja Modal Kursi Kerja - Belanja Modal Webcam - Belanja Modal Soundsytem - Belanja Modal Mic Conference - Belanja Modal Microphone Wireless - Belanja Modal Camera - Belanja Modal Handy Talky (TPA) - Belanja Modal PC - Belanja Modal Laptop - Belanja Modal Scanner - Belanja Modal Printer														
Kegiatan 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	100	47,812,487,030	100	44,812,500,000	100	45,693,750,000	100	47,063,125,000	100	51,100,000,000	
Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	399,261,854	12	412,500,000	12	453,750,000	12	499,125,000	12	500,000,000	

[illegible]

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup 2025

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KET
1	2	3	4	5	6	7
A.	Prioritas Kepala Daerah					
	Bogor Sehat					
	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Terbangunnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan	Sasaran Kegiatan : Terkelolanya sampah di Kota Bogor Sasaran Sub Kegiatan : 1. Melaksanakan Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS 2. Melaksanakan Peningkatan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS 3. Melaksanakan Optimalisasi TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS 4. Melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Program : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/T PS" 2. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/T PS" 3. Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/T PS" 4. Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS"	Indikator Program : Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah Indikator Kegiatan : Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan Indikator Sub Kegiatan : 1. Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun 2. Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan 3. Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi 4. Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	Janji Politik

		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pengolahan sampah di sumber	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Sasaran Sub Kegiatan : 1. Melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2. Meningkatkan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 3. Meningkatkan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Program : Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota 2. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah 3. Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Indikator Program : Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah Indikator Kegiatan : 1. Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R 2. Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 2. Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 3. Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Janji Politik
--	--	---	---	---	---	---------------

		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga yang melakukan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Sasaran Sub Kegiatan : Melaksanakan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program : Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikator Program : Persentase partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Kegiatan : Jumlah RT/Masyarakat/ Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Janji Politik
--	--	---	---	---	--	---------------

				Sasaran an P Sub P P P P L Menin N gkatny a K Kapasi P tas P dan L Kompe L tensi T Sumbe K r Daya Manusi S a Bidang : Lingku P ngan K Hidup M untuk h Lemba f ga Kemas k yaraka tan
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Kegiatan/Usaha	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup terhadap masyarakat	

Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

				Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	Indikator Program : Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Kegiatan : 1. Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan 2. Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 2. Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	
--	--	--	--	---	---	--

2	Penguatan Kualitas Kesehatan, Hunian, Kebersihan, Kebencanaan, dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta tersedianya RTH kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup Sasaran Sub Kegiatan 1 : 1. Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas 2. Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3. Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas 4. Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 5. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Sasaran Sub Kegiatan 2 : Melaksanakan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kegiatan 1 : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2. Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK 3. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 4. Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kegiatan 2 : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indikator Program : 1. Persentase Jumlah Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu 2. Persentase Jumlah Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu 3. Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi Indikator Kegiatan 1 : 1. Jumlah Titik Pengujian Kualitas Air, Sungai dan Situ 2. Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien 3. Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2. Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK 3. Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut yang dipantau	Mandatory
---	--	---	---	--	--	-----------

				Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	4. Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun Indikator Kegiatan 2 : Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	
--	--	--	--	--	---	--

		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Sasaran Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Sub Kegiatan : 1. Melaksanakan fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 2. Melaksanakan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 2. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikator Program : Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Kegiatan : Jumlah laporan dari usaha dan atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah Kab/Kota Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan 2. Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Mandatory
--	--	--	---	--	---	-----------

		Meningkatnya responsivitas penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Sasaran Sub Kegiatan : Melaksanakan pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Indikator Program : Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti Indikator Kegiatan : Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/dikelola Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	
--	--	--	---	--	--	--

		Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Jumlah Kegiatan/Usaha penghasil Limbah B3 yang dibina Sasaran Sub Kegiatan : Melaksanakan verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Program : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Sub Kegiatan : Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Indikator Program : Persentase Limbah B3 yang terkelola Indikator Kegiatan : Persentase Jumlah Rincian Teknis B3 yang dikeluarkan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Mandatory
--	--	--	--	--	--	-----------

		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	Sasaran Kegiatan 1: Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun Sasaran Kegiatan 2 : Tersusunnya Kajian Lingkungan Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan 1 : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peninjauan kembali terhadap RPPLH Kabupaten/Kota Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Indikator Program : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah Indikator Kegiatan 1 : Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Indikator Sub Kegiatan : Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang dilakukan peninjauan kembali Indikator Kegiatan 2 : Jumlah Dokumen KLHS yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Mandatory
--	--	---	---	---	---	-----------

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup 2025

Tabel 4.4.
Rencana Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Penjelasan	Satuan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Sub Kegiatan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	Prioritas Kepala Daerah													
	BOGOR SEHAT													
	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	- Jasa Penunjang Retribusi Kebersihan (PDAM) - Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan (Karung Plastik) - Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan TPS 3R - Jasa Uji Kualitas Laboratorium - Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Gedung TPS 3R - Pemeliharaan Bangunan Gedung TPS 3R - Jasa Konsultansi Pengawasan Bangunan Gedung TPS 3R	Ton	5015,1 Ton	952,468 ,800	5051,6 Ton	1,220,0 00,000	5088,1 Ton	1,250,0 00,000	5124,6 Ton	1,250,000 ,000	5161,1 Ton	1,350,000 ,000	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
		Pekerjaan Pembangunan TPS dan TPS 3R	Ton/hari	547,18 Ton/ Hari	0	547,98 Ton/ Hari	300,00 0,000	548,18 Ton/ Hari	300,000 ,000	548,38 Ton/ Hari	300,000,0 00	548,58 Ton/ Hari	300,000,0 00	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

		Pekerjaan Rehabilitasi TPS	unit	40 Unit	200,000 ,000	42 Unit	280,00 0,000	44 Unit	280,000 ,000	46 Unit	300,000,0 00	48 Unit	300,000,0 00	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS
		- Pengadaan Sapu Lidi - Gerobak Sampah - Tempat Sampah beroda 1100 Liter - Tong Sampah Terpilah Fiber - Tempat Sampah beroda 660 Liter - Tempat Sampah Terpilah Steanless - Kantong Sampah Portable - Kantong Kompos - Arm Roll Truck - Damp Truck - Compastor Truck - Dump Truck untuk PSEL - Arm Rall Truck untuk PSEL - Whell Loader - Bak Kontainer - Motor Sampah - Pick Up Dump - Mini Sweaper - Electrical Hand Push Sweaper	unit	1240 Unit	7,651,2 91,631	1243 Unit	11,500, 000,00 0	1246 Unit	9,000,0 00,000	1249 Unit	10,000,00 0,000	1252 Unit	11,000,00 0,000	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS
		- Pengadaan jaring dan terpal untuk angkutan sampah - Perjalanan Dinas Supir ke TPA Galuga dan Nambo	unit	128 Unit	2,849,1 14,300	129 Unit	3,000,0 00,000	130 Unit	3,200,0 00,000	132 Unit	3,500,000 ,000	134 Unit	3,800,000 ,000	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penaganan sampah

		- Penutupan Lahan /Zona Dengan Tanah (Controlled Landfill) - Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone) - Perencanaan Controoled Landfill, - Pengawasan Controlled Landfill, - Perencanaan Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA, - Pengawasan Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA - Pemeliharaan Gedung dan Hanggar Kantor TPA - Pemeliharaan Gedung Kompos - Pemeliharaan Hanggar Alat Berat - Pemeliharaan Jembatan Timban - Rehabilitasi Hanggar Tangki BBM - Pengadaan Exavator 1 unit - Pengadaan Bulldozer 1 unit - Pembangunan Taman Area Emplacement dan Hanggar Tangki - Perencanaan Pembangunan Taman TPA, - Pengawasan Pembangunan Taman TPA - Pembangunan Pagar Tembok Pembatas,	unit	9 Unit	14,402,788,000	10 Unit	9,000,000,000	10 Unit	9,500,000,000	10 Unit	10,000,000,000	10 Unit	10,500,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota
--	--	--	------	--------	----------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	----------------	---------	----------------	---

		- Pembebasan Lahan di TPA Galuga - Cut & Fill lahan di TPA Galuga untuk PSEL												
		Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup/Pengelolaan Sampah	Entitas	5 Entitas	550,000,000	5 Entitas	600,000,000	5 Entitas	600,000,000	5 Entitas	700,000,000	5 Entitas	750,000,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- Penyelenggaraan Acara Bogorku Bersih - Pembinaan Adiwiyata	Lemb/ Komunitas/ Kelompok Masy	30 Lemb/ Komunitas/ Kelompok Masy	500,000,000	35 Lemb/ Komunitas/ Kelompok Masy	800,000,000	40 Lemb/ Komunitas/ Kelompok Masy	800,000,000	40 Lemb/ Komunitas/ Kelompok Masy	800,000,000	45 Lemb/ Komunitas/ Kelompok Masy	800,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup 2025

Tabel 4.5.
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Asta Cita

No	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta tersedianya RTH kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup Sasaran Sub Kegiatan 1: 1. Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Sasaran Sub Kegiatan 2 : Melaksanakan Pemulihan Pencemaran dan/atau	Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indikator Program : 1. Persentase Jumlah Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu 2. Persentase Jumlah Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu 3. Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	

				Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
					Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : 1. Jumlah Titik Pengujian Kualitas Air, Sungai dan Situ 2. Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien 3. Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	Indikator Sub Kegiatan : Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	
2		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pengolahan sampah di sumber	Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Sasaran Sub Kegiatan 2 : Meningkatkan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/K	Program Pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	
					Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	

						Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	
					Sub Kegiatan 2 : Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup 2025

4.3 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja utama dan Indikator kinerja kunci ini merupakan target pemerintah daerah yang harus dicapai dalam Renstra yang merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup. Tabel Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 4.6.

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
INDIKATOR KINERJA UTAMA										
1	Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	Persentase	NA	79.16	79.16	79.16	79.16	79.16	79.16	
2	Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Persentase	NA	88.88	88.88	88.88	88.88	88.88	88.88	
3	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	Ha	0.5	0.5	1	1.5	2	2.5	3	
4	Persentase timbulan sampah terdaur ulang	Persentase	22.26	22.46	22.68	22.86	23.08	23.36	23.56	

5	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase	68.19	71.21	72.81	73.41	74.51	75.11	76.71	
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persentase	23.99	24.29	24.59	24.89	25.19	25.49	25.79	
7	Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	Predikat	A (89.50)	A (89.55)	A (89.60)	A (89.65)	A (89.70)	A (89.75)	A (89.80)	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase	3.61	3.61	3.62	3.63	3.64	3.65	3.66	
9	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Persentase	95	96	96.05	96.10	96.15	96.20	96.25	
10	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi	NA	1	1	1	1	1	1	

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup 2025

Tabel 4.7.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	59.34	57.84	58.09	58.34	58.60	58.85	59.10	
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persentase	93.73	94.29	94.33	94.37	94.41	94.45	94.49	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	Persentase	58	58.32	58.45	58.58	59.71	60.84	61.04	

	Pemerintah Daerah Kab/Kota									
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup 2025

BAB V **PENUTUP**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025–2029 merupakan langkah-langkah kontribusi Dinas Lingkungan Hidup untuk pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Prinsip perencanaan dilandasi dan dibatasi oleh kewenangan sesuai dengan Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dalam Perda terkait, dimana tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian perubahan iklim serta penataan hukum lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi, permasalahan lingkungan yang seringkali bersifat transboundary, lintas sektoral dan multi-dimensi pada pelaksanaannya, keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan seluruh stakeholder, termasuk upaya Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah lainnya dalam melaksanakan rencana Program Kegiatan yang memiliki dampak terhadap perbaikan lingkungan, baik dalam skala makro maupun mikro; khususnya dalam aspek-aspek yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang kewenangannya berada di luar kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam Renstra ini, strategi dan arah kebijakan yang diterjemahkan menjadi rencana program dan kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan Renstra bidang lingkungan hidup, yaitu : “Terwujudnya peningkatan kualitas Lingkungan Hidup” dengan sasaran “Terkendalinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahun.

Demikian dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat khususnya bagi internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor maupun bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor pada umumnya.

WALI KOTA BOGOR,

DEDIE A. RACHIM